



Penulis :

Machful Indra Kurniawan, M.Pd

Buku Ajar

KONSEP DASAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

**BUKU AJAR
KONSEP DASAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH DASAR**

Penulis

Machful Indra Kurniawan, M.Pd



Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-602-5914-32-4

Copyright©2018.

Authors

All rights reserved

BUKU AJAR

**KONSEP DASAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR**

Penulis :

Machful Indra Kurniawan, M.Pd

ISBN :

978-602-5914-32-4

Editor :

Septi Budi Sartika, M.Pd

M. Tanzil Multazam , S.H., M.Kn.

Copy Editor :

Fika Megawati, S.Pd., M.Pd.

Design Sampul dan Tata Letak :

Mochamad Nashrullah, S.Pd

Penerbit :

UMSIDA Press

Redaksi :

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No 666B

Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, Agustus 2018

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada jenjang sekolah dasar, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan dalam memberikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan harus memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dasar pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Buku ini membahas tentang konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar yang terdiri dari pokok bahasan, antara lain: 1. Konsep dan prinsip Pendidikan Kewarganegaraan, 2. Paradigma pendidikan kewarganegaraan, 3. Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, 4. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, 5. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Buku ini disajikan secara sistematis dan sederhana dengan tujuan agar pembaca mudah memahami pembahasan yang telah disajikan dalam setiap bab. Oleh karena itu, buku ini sangat sesuai dijadikan referensi bagi praktisi maupun akademisi terutama dilingkungan perguruan tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar ini. Adapun tujuan disusunnya buku ini yaitu agar dapat dijadikan referensi bagi praktisi maupun akademisi terutama dilingkungan perguruan tinggi dalam memahami konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, shabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku yang tersusun ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Sidoarjo, 20 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IDENTITAS BUKU	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Bab I Konsep dan Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan	1
A. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan	1
B. Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan	4
Bab II Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan	7
A. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan	7
B. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan	9
Bab III Pendidikan Kewarganegaraan di Berbagai Negara	18
A. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	18
B. Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia	24
C. Pendidikan Kewarganegaraan di Korea	27
D. Pendidikan Kewarganegaraan di Cina	30
E. Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang	33
F. Pendidikan Kewarganegaraan di Australia	37
G. Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika	39
Bab VI Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.....	34
A. Perkembangan PKn Sebelum Proklamasi Kemerdekaan ...	43
B. Perkembangan PKn Sesudah Proklamasi kemerdekaan	45
C. Perkembangan PKn Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang	53
Bab V Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar Belajar dan Pembelajaran	57
A. <i>Thinking Skills</i> dalam Pembelajaran PKn SD	66
B. <i>Affective Teaching</i> dalam Pembelajaran PKn SD	100
DAFTAR PUSTAKA	106

Bab I

Konsep dan Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan

Capaian Pembelajaran: Dengan mempelajari konsep dan prinsip pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa dapat memahami berbagai macam konsep dan prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan.

A. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontology pokok ilmu politik khususnya konsep *political democracy* untuk aspek *duties and rights of citizen* (Chreshore:1886). Dari ontology pokok inilah kemudian berkembang konsep *Civics* yang secara harafiah (dalam bahasa Latin) adalah *civicus* yang artinya warga negara pada zaman Yunani kuno. Berawal dari pengertian itulah kemudian berkembang dan secara akademis diakui sebagai embrionya *civic education*. Di Indonesia *civic education* ini diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi *social studies* yakni *citizenship transmission* (Barr, Barnt, dan Shermis:1978). Tradisi *social studies* mengalami perkembangan pesat sehingga kini telah menjadi suatu *body of knowledge* yang memiliki paradigma sistemik berisi tiga domain *citizenship education* yaitu: domain akademis, kurikuler, dan sosial kultural. PKn secara pragmatik memiliki visi socio-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, antara lain mencakup konteks pendidikan formal dan non-formal.

Sedangkan secara umum PKn memiliki visi formal-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal. Di Indonesia PKn memiliki visi formal-pedagogis, yakni sebagai mata pelajaran sosial dalam dunia persekolahan dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk mendidik warganegara Indonesia yang Pancasilais (winataputra: 2001).

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar. Ruminiati (2007: 1.15) menyatakan bahwa pelajaran PKn merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan afektif. Tetapi di dalam pelaksanaan pembelajaran, tidak sedikit yang salah menafsirkan bahwa PKN dengan PKn merupakan hal yang sama. Padahal keduanya memiliki definisi dan fungsi yang berbeda dalam pembelajaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soemantri bahwa PKN adalah pendidikan kewargaan negara, yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik, sedangkan PKn adalah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang berisi tentang diri kewarganegaraan, peraturan naturalisasi atau pemerolehan status sebagai WNI (Ruminiati, 2007: 1 – 25).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik tentang bela negara dan memahami hubungan antara warga negara dengan negara dengan tujuan agar

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Somantri, 2001: 154). Merujuk pengertian tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menjaga harkat dan martabat sebuah bangsa. Oleh sebab itu, Indonesia memasukan Pendidikan Kewarganegaraan kedalam sistem pendidikan nasional melalui Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi, yang menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang fokus membentuk warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut Sunarso, dkk (2008: 1), mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*", atau dengan kata lain pendidikan berbasis nilai.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter dan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik, agar peserta didik mampu:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaran

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam pencatutan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
(Sunarso, dkk. 2008: 11)

B. Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan

Prinsip pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk masyarakat yang mampu berperan aktif dalam sistem pemeritahan demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, maka tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu membentuk peserta didik agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, karakter, dan keterampilan warga negara.

Misi pendidikan kewarganegaraan menurut Winarno (2006 : 29) antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai wawasan kebangsaan, artinya pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan peserta didik agar mampu memahami prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pendidikan yang demokratis, artinya pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan peserta didik agar

mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Pendidikan yang berkarakter, artinya pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaran dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 diklasifikasikan dalam ruang lingkup pembelajaran dalam standar isi, yang meliputi:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Norma, hukum, dan peraturan.
- c. Hak asasi manusia.
- d. Kebutuhan warga negara.
- e. Konstitusi negara.
- f. Kekuasaan dan Politik.
- g. Pancasila.
- h. Globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa materi pembelajaran pada mata pelajaran PKn terangkum dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn di SD terdiri dari beberapa aspek, meliputi: ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa, ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan, ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia), ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara, ruang lingkup

kekuasaan dan politik, ruang lingkup pancasila, serta ruang lingkup globalisasi.

Bab II

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Capaian Pembelajaran: Dengan mempelajari konsep paradigma kewarganegaraan, mahasiswa dapat memahami paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

A. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 3 menyebutkan bahwa “pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Undang-undang tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan manusia yang berkarater dimulai sejak Poklamsi kemerdekaan bangsa Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari dimasukkannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kedalam kurikulum pendidikan nasional mulai tahun 1968 hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Paradigma merupakan seperangkat asumsi baik secara implisit maupun eksplisit tentang fenomena yang menjadi landasan dari gagasan-gagasan analisis keilmuan (Philips,

1971). Wilardjo (2000) mendefinisikan bahwa paradigma adalah kerangka keyakinan penata (*ordering believe framework*) yang menjadi bintang pemandu (*the guiding star*) yang menuntun kegiatan keilmuan masyarakat keilmuan. Merujuk pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah kerangka keyakinan terhadap seperangkat asumsi baik secara implisit maupun eksplisit terhadap fenomena yang menjadi sebuah landasan dalam menganalisis keilmuan.

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam proses perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani, yakni masyarakat bangsa dan negara yang berpijak dari dan bermuara pada konsep dan nilai Pancasila dan UUD 1945, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, perlu menyesuaikan diri secara adaptif dan koheren dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah.

Proses pembangunan karakter dan bangsa (*national and character building*) yang sejak Proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu secara konsisten dan sinambung dilakukan dan dikembangkan secara sistematis dan sistemik agar sesuai dengan suasana kebatinan, nilai, dan norma yang secara tersurat dan tersirat terkandung dalam sistem konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya proses pembangunan karakter dan bangsa harus dengan sengaja dimaksudkan untuk membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, religius,

beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial. Dalam proses itulah, pembangunan karakter dan bangsa harus disikapi dan diperlakukan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak yang secara konseptual dan programatik memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru

B. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Perjalanan bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat madani membutuhkan proses yang cukup panjang. Masyarakat madani adalah masyarakat suatu bangsa dan negara dalam menjalani kehidupannya bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu menyesuaikan diri secara adaptif dan koheren dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah, oleh sebab itu Pendidikan Kewarganegaraan dengan Paradigma barunya memiliki misi untuk mengembangkan pendidikan demokrasi secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis yang berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*), dengan kata lain bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara demokratis yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Adapun tiga karakteristik Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecerdasan warga negara (*civic intelligence*)

Kecerdasan warga negara yaitu kecerdasan dan daya nalar yang harus dimiliki warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu memberikan pengetahuan kepada warga negara. Adapun pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara, yaitu berkaitan dengan hak kewajiban, struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis dengan tujuan untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

2. Tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*)
Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab harus memiliki Sifat-sifat yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) antara lain, sebagai berikut:
 - a. Keberadaban (*civility*), seperti: menghormati orang lain; menghormati, pendapat orang lain meskipun tidak sepaham, mendengarkan pandangan orang lain, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal
 - b. Menghormati hak-hak orang lain, seperti: menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukum; menghormati hak orang lain untuk memegang dan menganjurkan gagasan yang

bermacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.

- c. Menghormati hukum, seperti: berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinnya, berkemauan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil.
- d. Jujur, seperti: berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
- e. Berpikiran terbuka, seperti: yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
- f. Berpikir kritis, seperti: yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
- g. Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi, seperti: bersedia untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya.
- h. Ulet/tidak mudah putus asa, seperti: memiliki kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
- i. Berpikiran kewarganegaraan, seperti: memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan-urusan publik/kemasyarakatan.
- j. Kecharuan/memiliki perasaan kasihan, seperti: memiliki kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
- k. Patriotisme, seperti: memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.
- l. Keteguhan hati, seperti: kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.
- m. Toleran terhadap ketidak pastian, seperti: memiliki kemampuan untuk menerima ketidak pastian yang

muncul, karena ketidak cukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fundamental dengan prinsip-prinsip.

- n. Bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana, Seperti: Sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan public, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

3. Partisipasi warga negara (*civic participation*)

Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan Indonesia, oleh karena itu, partisipasi warga negara terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.

Misi PKn dengan paradigma barunya yaitu menciptakan masyarakat yang demokratis, perlu dikembangkan ke arah pengembangan kecerdasan spiritual, emosional dan sosial. Dengan demikian paradigma baru PKn secara konseptual dan programatik bersifat multidimensional.

Berdasarkan penelitian Cogan (1998) ada delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
5. Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
6. Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnik, dan sebagainya).
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Atas dasar hasil penelitian ini, kita harus memantapkan, mengaktualisasi dan mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan kerangka berpikir yang baru.

Suryadi dan Somardi (1999) mengemukakan bahwa untuk mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Negara adalah suatu bentuk khusus dari tata kehidupan sosial yang dibangun dari sejumlah komponen dasar di dalam suatu sistem yang integral. Komponen-komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara terdiri dari sistem personal, sistem kelembagaan, sistem normatif, sistem kewilayahan, dan sistem ideologis sebagai

faktor integratif bagi seluruh komponen. Lima sistem tata kehidupan bernegara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertama, sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan 'yang diperintah'. Kedua jenis subjek ini yaitu pemerintah dan yang diperintah pada dasarnya memiliki atribut yang sama, yaitu sebagai warga negara, namun dalam fungsinya yang berlainan. Dari perspektif demokrasi, yang disebut pertama adalah pemegang mandat atau amanat dengan seperangkat wewenangnya untuk mengelola kepentingan bersama dan mewujudkan tujuan bersama. Fungsi yang kedua, sebagai pemberi mandat, pemegang kedaulatan. Dengan demikian, pola hubungan di antara kedua subjek ini pada dasarnya merupakan hubungan kepercayaan (*trust*). Pemberian kepercayaan atau transfer kekuasaan di antara kedua subjek di atas diselenggarakan melalui proses dan mekanisme politik dengan mekanisme yang disetujui bersama. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap proses dan mekanisme ini merupakan landasan utama untuk memahami posisi, fungsi-peran, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kapasitasnya masing-masing. Seperti telah dikemukakan, bahwa suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menempati jabatan publik. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan mengemban misi bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional Indonesia maka

selayaknya sistem personal dari kehidupan bernegara ini harus menjadi salah satu substansi pokoknya.

2. Kedua, sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan ini merupakan prasyarat dasar bagi warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga, proses dan mekanisme perekrutan para pejabat dari masing-masing lembaga, serta aspek-aspek lainnya, perlu dipahami oleh setiap warga negara agar partisipasinya dalam kehidupan bernegara dapat ditingkatkan.
3. Ketiga, sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara. Pemahaman terhadap sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan prasyarat bagi partisipasi warga negara secara nalar dan penuh tanggung jawab.
4. Keempat, sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia.
5. Kelima, sistem ideologis merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena sifatnya sebagai faktor integratif maka sistem ideologi ini hendaknya memayungi seluruh komponen sistem lainnya.

Tinjauan sistemik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang eksistensi kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara secara sehat merupakan fungsi dari seluruh komponen sistemnya. Dengan kata lain, kerusakan dalam satu komponen sistem akan mengganggu berfungsinya sistem kenegaraan secara keseluruhan.

Di samping itu, potret kehidupan bernegara secara sistemik ini membantu memperjelas hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai satu bidang yang multi-disipliner dan multi-dimensional. Meskipun demikian, pendekatan dalam pengorganisasian PKn tetap bersifat terpadu (*integrated*). Sebagai contoh, materi hukum sebut saja konstitusi diajarkan dalam kerangka memperkuat pemahaman tentang bentuk pemerintahan. Demikian pula halnya dengan materi-materi lainnya.

Pendidikan nilai, moral, dan/atau budi pekerti mendapat tempat khusus dalam pokok-pokok bahasan yang secara langsung berkaitan dengan “warga negara” (sistem personal). Di samping itu, muatan nilai, moral, dan budi pekerti yang diharapkan dari warga negara, akan selalu menjadi pengiring dalam setiap pokok bahasan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembelajaran mengenai pokok bahasan apapun pada akhirnya harus mendukung terbentuknya partisipasi warga negara yang penuh nalar dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Dengan memperhatikan atribut-atribut kewarganegaraan di atas, dan struktur pengorganisasian yang berorientasi pada sistem kehidupan bernegara maka materi pendidikan

kewarganegaraan selayaknya memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara, yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era global.

Berdasarkan hal tersebut, PKn dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era global.

Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara (1) merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan (2) diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara hendaknya mengerti bahwa dengan keterlibatannya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tetangga, masyarakat, dan bangsanya.

Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan; menjelaskan dan menganalisis; mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.

Bab III

Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di Berbagai Negara

Capaian Pembelajaran: Dengan mempelajari konsep pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, mahapeserta didik mampu memahami pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, seperti: Indonesia, Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Australia, dan Amerika

A. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah nusantara

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan

patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesangupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain pengaruh globalisasi

Globalisasi ini ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan Negara berkembang, antara Negara berkembang dan lembaga internasional, maupun antara Negara berkembang. Disamping itu, isu global yang mengikuti demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional

Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi membuat dunia jadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan

mempengaruhi struktur dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa Perjuangan Fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan Perjuangan Non Fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan inipun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela Negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan Non Fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia secara formal mulai berkembang dengan nama "*Civics*" dalam kurikulum SMA tahun 1962. mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato-pidato presiden,

deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa.

Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah tersebut diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai berlakunya kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.

Berlakunya Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (pasal 39), kurikulum pendidikan dasar dan menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan spiral meluas atau "*spiral of concept development*". Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan serta dalam setiap kelas.

Sementara itu untuk mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang demikian cepat sejak tahun 2004 dilakukan pembaharuan kurikulum. Pada saat kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, yang dikenal dengan sebutan kegiatan filoting, Peraturan Pemerintah (PP) tentang setandar nasional pendidikan (PP SNP) diterbitkan. PP tersebut mengamanatkan bahwa yang berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara dalam kurikulum 2004, kurikulum masih disusun oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berarti melanggar aturan. Maka dilakukanlah perubahan berkelanjutan (kontinu) yang dilakukan badan setandar nasional pendidikan (BSNP).

Berdasarkan bahan dasar yang ada di kurikulum 2004 BSNP mengembangkan setandar isi (Permen Nomor 22 Tahun 2006) dan setandar kompetensi lulusan (Permen Nomor 23 Tahun 2006). Setandar isi dan setandar kompetensi lulusan itu merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam setandar isi maupun setandar kompetensi lulusan, PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No 20/2003).

Pada proses pembelajaran PKn di Indonesia, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menyampaikan, menanamkan, mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada anak didik agar menjadi manusia dan warga Negara Indonesia yang berakarakter dan demokratis. Dalam pelaksanaannya, PKn harus mampu mengembangkan warganegara, sebagai berikut:

1. *Civics Intellegence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial.
2. *Civics Responsibility*, yaitu kecerdasan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan
3. *Civics Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Hakikat mata pelajaran PKn merupakan suatu upaya untuk mengartikan, menyalurkan, dan membina peran warga negara dari berbagai aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warga negara yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. serta memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara Indonesia yang berakarakter dan demokratis. Maka PKn memiliki peranan yang sangat besar dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraa diharapkan dapat mentransformasikan, menanamkan, mengembangkan,

serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

B. Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia

Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia disebut pendidikan moral dan pendidikan nilai yang merupakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan yang berlaku di Malaysia. Pada masa awal pendidikan formal di era kolonial, pendidikan moral diberikan dalam bentuk pengajaran alkitab, yaitu mata pelajaran yang diberikan ditingkat sekolah menengah khusus untuk murid beragama Kristen. Untuk murid yang non-Kristen setiap minggunya diberikan pelajaran etika disertai dengan ringkasan secara bebas dari kitab injil serta penekanan bagaimana menjadi seorang yang baik (Mukherjee, 1983).

Setelah Malaysia merdeka, pola yang sama diterapkan, hanya pengajaran alkitab berubah menjadi pengajaran agama Islam karena Islam adalah agama resmi Negara Malaysia, dan hal itu diberikan hanya kepada murid muslim saja. Untuk penganut agama lain yang dijamin oleh konstitusi, pelajaran agama Islam tidak boleh dipaksakan, demikian juga pengajaran etika Islam dalam pembelajaran. Jalan keluarnya adalah seperti yang dirintis oleh Inggris sebelumnya, diperkenalkan pelajaran moral atau pendidikan nilai dalam pembelajaran dikelas (Rahimah, 1998).

Untuk mengisi kekosongan pendidikan karakter bagi peserta didik non-muslim, menurut Rahimah (1998) pada awal tahun 1970-an mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan sebagai pelajaran wajib untuk semua murid yang nonmuslim. Karena pelajaran ini tidak diujikan dalam ujian akhir, dianggap tidak efektif sehingga sekolah tidak

menanggap penting dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan orientasi pendidikan yang masih menekankan pada ujian, berbeda dengan pelajaran agama Islam yang memang diujikan.

Berdasarkan kajian yang mendalam tentang sistem pendidikan Malaysia yang diketuai oleh Dr. Mahathir sebagai Menteri Pengajaran pada saat itu, terbitlah Laporan Kabinet 1979 yang menjadi peletak perubahan mendasar pendidikan di Malaysia (Rahimah, 1998; Vishalache, 2009). Laporan Kabinet memutuskan perlunya Pendidikan Moral diajarkan bagi peserta didik nonmuslim dan diakomodasikan dalam kurikulum baru sekolah dasar pada tahun 1983, sedangkan untuk sekolah menengah dimulai enam tahun kemudian dengan penerapan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Pelajaran moral diberikan secara bertahap mulai tahun kesatu pada peserta didik sekolah dasar dan menengah. Tahun 1993 adalah gelombang pertama peserta didik Malaysia yang terdidik dengan Pendidikan Moral (Vishalache, 2010). Penetapan utama yang ada dalam pelajaran moral ini adalah peserta didik nonmuslim diharuskan untuk belajar pendidikan moral yang diberikan bersamaan waktunya pada saat peserta didik muslim belajar Pendidikan Agama Islam, serta termasuk dalam mata pelajaran yang diujikan.

Pusat Pengembangan Kurikulum Kementerian Pengajaran Malaysia kemudian mengembangkan isi kurikulum pendidikan moral yang harus merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Malaysia. Pada awalnya, pendidikan moral menekankan aspek-aspek spiritual, kemanusiaan dan sosial masyarakat majemuk Malaysia yang harus dipahami oleh

peserta didik. Namun, wujudnya kemudian berubah menjadi penentuan nilai-nilai utama yang bisa diterima serta harus disetujui oleh berbagai kelompok penganut agama yang ada (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Tao dan lainnya) dan kelompok masyarakat tradisional lainnya yang tidak menganut agama secara formal. Suatu komite dibentuk untuk merumuskan seperti apa silabus pendidikan moral yang akan diajarkan kepada peserta didik nonmuslin tersebut. Akhirnya, ditetapkan enam belas buah nilai utama (yang disebut sebagai 'nilai murni') yang disetujui, yaitu: (1) baik hati; (2) berdikari; (3) hemah tinggi (sopansantun); (4) hormat-menghormati; (5) kasih sayang; (6) keadilan; (7) kebebasan; (8) keberanian; (9) kebersihan fizikal dan mental; (10) kejujuran; (11) kerajinan; (12) kerjasama; (13) kesederhanaan; (14) kesyukuran; (15) rasional; dan (16) semangat bermasyarakat (gotong royong) (Chew, 2010:3).

Nilai-nilai murni tersebut diturunkan dari nilai-nilai agama, tradisi, kebiasaan masyarakat yang ada di samping juga mempertimbangkan aspek universal (Rahimah, 1998). Semua nilai tersebut berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dalam keluarga, teman sejawat, masyarakat ataupun organisasi. Silabus pendidikan moral tidak menempatkan hirarki nilai-nilai murni ataupun urutannya bila diajarkan. Keenambelas nilai murni tersebut harus diajarkan kepada peserta didik sehingga akan terus memahami dan tertanam dalam diri mereka. Tentu saja lingkup dan kedalaman yang diberikan bergantung kepada tingkatan kelas dan kedewasaan peserta didik (Rahimah, 1998). Rahman dan Chang (1994) menyatakan bahwa pendidikan moral dilakukan melalui interaksi dalam sekolah

(secara klasikal di dalam kelas) maupun luar sekolah, yang tidak lain bermaksud memberikan situasi yang membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ujian mata pelajaran moral, Vishalache (2010) menyatakan dinamikanya tersendiri. Berhubung moralitas bersifat subjektif, penilaian secara objektif menjadi tantangan yang berkelanjutan dan seolah tidak berakhir. Setelah berbagai revisi sistem pengujian, akhirnya penilaian dilakukan dalam dua aspek, yaitu pengetahuan secara tertulis dan kerja praktek, yaitu aktivitas peserta didik dalam domain fisik dan afektif.

C. Pendidikan Kewarganegaraan di Korea

Terjadinya perang Korea dan pesatnya kemajuan industrialisasi, berdampak pada kebutuhan akan nilai-nilai demokrasi mulai bangkit. Para pendidik Korea mulai mendambakan cara demokratis dalam hidup yang harus dimasukkan ke dalam diri anak-anak sejak dini melalui suatu pendidikan yang sistematis. Sejak saat itu, beberapa nilai-nilai demokratis senantiasa bercampur dengan nilai-nilai tradisional Korea. Sebagai contoh, pandangan hidup orang Korea yang didasarkan pada kesetiaan dan cinta kasih yang mendalam seringkali harus diikuti oleh solusi secara rasional dan menurut proses demokratis dalam kehidupan publik (Syamsudin, 2011).

Pendidikan moral di Korea saat ini merupakan hasil refleksi atas situasi dan faktor historis tersebut. Kebutuhan-kebutuhan untuk membangun identitas nasional bangsa Korea memerlukan nilai-nilai dan sikap demokratis yang dapat menciptakan suatu kesepakatan moral melalui sintesis antara

nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai demokratis. Membicarakan pendidikan moral di Korea, maka dalam konteks sintesis nilai tradisional dan nilai demokratis itulah, konsep dan implementasi pendidikan moral di Korea saat ini diarahkan. Oleh sebab itu, dalam kurikulum pendidikan moral, setiap aspek pendidikan moral di sekolah-sekolah Korea dirinci sehingga tergambar secara jelas dalam rumusan maksud, tujuan, isi (daftar keutamaan moral), metode pengajaran, dan evaluasi bagi setiap kelas di sekolah. Lebih dari 50 tahun, yaitu sejak 1945 sampai sekarang, kurikulum pendidikan moral di Korea Selatan seringkali mengalami perubahan seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan moral yang pertama (1954-1963).
Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang mengalami modernisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Korea. Pendidikan moral pada era ini difokuskan pada pendidikan kewarganegaraan (civics education).
2. Kurikulum pendidikan moral yang kedua (1963-1973).
Kurikulum ini difokuskan pada etika anti-komunisme, pembaharuan ekonomi, dan nilai-nilai tradisional.
3. Kurikulum pendidikan moral yang ketiga (1973-1982).
Pendidikan moral menjadi bagian pelajaran tersendiri dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagai bagian pelajaran tersendiri, pendidikan moral difokuskan pada pendidikan dengan model yang demokratis dan berorientasi pada pembangunan ekonomi.
4. Kurikulum pendidikan moral yang keempat (1982-1987).
Pendidikan moral difokuskan pada pengembangan metode pengajaran, dari "pendekatan nilai-nilai

kebajikan” kepada “pendekatan pengembangan pengetahuan/kognitif. Pembicaraan dan diskusi moral lebih ditekankan daripadasekedar menghafal ajaran-ajaran moral.

5. Kurikulum pendidikan moral yang kelima (1987-1992). Kurikulum ini menekankan unsur-unsur demokrasi yang diimplemetasikan dalamkehidupan. Terdapat juga perubahan fokus dari anti komunisme kepada isu unifikasikedua Korea dan pendidikan yang berorientasi pada pertahanan nasional
6. Kurikulum pendidikan moral yang keenam (1992-2000). Kurikulum ini dipraktekkan sekarang, berpusat pada etika komunitarian, dasarperilaku moral, dan karakter perilaku moral yang otonom. Tujuan inti kurikulum iniadalah untuk menyeimbangkan antara mengajarkan keutamaan moral danmengajarkan pertimbangan-pertimbangan rasional bagi moral. Kurikulum inimenekankan pelajaran tentang pandangan hidup dalam upaya “unifikasi Korea” dan “Setelah unifikasi Korea” (Syamsudin, 2011).

Pendidikan moral sebagai bagian pelajaran tersendiri didasarkan atas suatu keyakinan bahwa pendidikan moral di Korea harus bersifat universal dan sekaligus memiliki sifat khusus. Berdasarkan pada prinsip universal, maka pendidikan di Korea memperhatikan norma universal moral. berdasarkan prinsip particular pendidikan di Korea memperhatikan situasi khusus politik, masyarakat, ekonomi, dan teknologi yang sedang dihadapi oleh bangsa Korea. Menurut kurikulum nasional Korea yang keenam, pendidikan moral sebagai bagian pelajaran tersendiri tersebut telah sesuai dengan karakter bangsa Korea (Syamsudin, 2011).

Berdasarkan anggapan bahwa tidak ada metodologi pendidikan moral yang dapat diterapkan secara universal, maka metode pengajaran harus memperhatikan tingkat perkembangan moral dan pengetahuan peserta didik sehingga proses belajar-mengajar pendidikan moral dapat berlangsung secara efektif. Dalam hal ini, para guru didorong untuk menggunakan metode yang terkombinasi agar dapat menciptakan suasana kelas yang penuh makna, efektif, dan peserta didik dapat belajar secara menyenangkan sehingga dapat menstimulasi dan mengembangkan daya pikir serta kreativitas peserta didik.

D. Pendidikan Kewarganegaraan di Cina

Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (*ekuivalen*) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkat orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *Deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak

kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai 'macro-deyu'. Mikro-deyu berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-deyu (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen, *Behavioural Code for Primary and Secondary Students'* (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa: afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan Negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan keberanian untuk kreatif. Pada 1988, terdapat sebuah revisiradikal dalam kurikulum pendidikan politik. Di tingkat sekolah menengah pertama, mata pelajaran 'Civics' diperkenalkan di kelas 1 SMP (usia 12),

'social history' di kelas 2 SMP (usia 13), dan 'construction of Chinese socialism' di kelas 3 SMP (usia 14). Di tingkat sekolah menengah atas dikenalkan 'scientific view of life' untuk kelas 1 SMA (usia 15), 'economics' untuk kelas 2 SMA (usia 16), dan 'politics' di kelas 3 SMA. Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu *Outline of Moral Education Secondary School* yang diterapkan secara penuh pada 1991. Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli dengan kata 'ideologi.' Pendidikan moral mulai memfokuskan kepada kurikulum kewarganegaraan semata. Dokumen Outline itu mewajibkan pengajaran materi dan pendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan Ho, 2005: 419-420). Fokus utama Outline mencakup:

- 1) Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme
- 2) Standar moral dan perilaku siswa, dan adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembangkan kepercayaan diri (*self-esteem*), kemandirian (*self-reliance*), dan kekuatan diri siswa (Lee dan Ho, 2005: 420)

Pada 1993 dan 1994 Pemerintah Cina mengeluarkan dua dokumen penting yang merubah arah pendidikan moral. Dua dokumen itu ialah *Opinions on Strengthening and Improving the Party and Ideopolitical Works in Higher Institutes in New Circumstances* dan *Opinions on Further Strengthening and Improving Moral Education Work in Schools* (Lee dan Ho, 2005: 420). Dokumen itu meluncurkan gagasan pendidikan 'dua pelajaran', yang berarti bahwa pendidikan politik didefinisikan sebagai satu kombinasi pelajaran teori Marxis dan pelajaran pendidikan ideopolitik. Perbedaan dua pelajaran itu di dalam pendidikan moral itu mengatur pemeliharaan

pentingnya Marxisme dalam kurikulum sekolah, namun pada saat yang sama mencakup status resmi untuk pendidikan ideopolitik. Istilah 'pendidikan ideopolitik' lebih kepada 'penanaman kualitas moral.' (Lee dan Ho, 2005: 420-421).

E. Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang

Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang dapat ditelusuri mulai Perang Dunia kedua (1945). Pada masa itu, perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan mulai menunjukkan peningkatan. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19) (Otsu, 1998:51; Ikeno, 2005:93). Periode setelah kekalahan Jepang ini, merupakan titik balik yang sangat penting bagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yang lebih demokratis. Demikian pula perubahan dirasakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mata pelajaran ini telah bergeser penekanannya dari pendidikan untuk para warganegara dan pengajaran disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang, ke arah Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua warganegara (Ikeno, 2005:93).

Pendidikan Kewarganegaraan Jepang setelah Perang Dunia II dapat digambarkan dalam tiga periode (Ikeno, 2005:93) sebagai berikut: "Pertama, periode tahun 1947-1955, berorientasi pada pengalaman. Kedua, periode tahun 1955-1985, berorientasi pada pengetahuan, dan ketiga, periode tahun 1985-sekarang, berorientasi pada kemampuan".

Periode pertama, Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar diterapkan secara integratif ke dalam studi sosial. Studi sosial mengadopsi metoda-metoda pemecahan masalah,

seperti penelitian dan diskusi, dan mengajarkan kehidupan sosial dan masyarakat secara umum. Di dalam kelas, para guru dan anak-anak mempertimbangkan permasalahan kehidupan sosial dan masyarakat melalui pengalaman sosial yang diperoleh dengan pemecahan masalah. Mereka belajar tentang “masyarakat mereka sendiri” dan mengembangkan “sikap dan keterampilan-keterampilan untuk berpartisipasi secara positif untuk membangun masyarakat yang demokratis”.

Pelaksanaan pembelajaran studi sosial pada periode ini adalah melalui “yubin-gokko (*playing the post*)” dan “yamabiko-gakko (*echo school*)”. Dalam praktek ini, guru mengorganisir suatu struktur yang berhubungan dengan kegiatan pos sebagai satu aktivitas untuk anak-anak. Di yamabiko-gakko, guru mengorganisir aktivitas penyelidikan sehingga anak-anak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan melalui komposisi dan jawaban bebas mereka.

Dalam situasi demikian, anak-anak itu melaksanakan aktivitas, sementara para guru tidak mengambil peran yang besar untuk memimpin dalam proses pembelajaran tersebut. Banyak orang mengkritik praktek pembelajaran ini, mereka berpendapat bahwa dalam praktek pembelajaran tersebut, anak-anak hanya memperoleh pengetahuan biasa yang dipelajari tanpa sengaja, dan mereka menuntut para guru studi sosial untuk mengajar ilmu sosial secara sistematis.

Pada periode yang kedua, Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan atas prinsip intelektualisme yang berkembang dalam disiplin akademis. Kementerian Pendidikan Jepang memisahkan Pendidikan Moral (*dotoku*) dari studi sosial. Studi

sosial dipecah menjadi Geografi, Sejarah, dan politik/ekonomi/kemasyarakatan.

Masing-masing disiplin di atas terdiri atas seperangkat pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dipersiapkan agar para peserta didik memiliki pengetahuan inti tentang budaya Jepang secara umum. Pendidikan Kewarganegaraan periode kedua ini diarahkan agar para peserta didik memperoleh pengetahuan yang dianggap penting bagi bangsa Jepang.

Sasaran pengajaran Pendidikan Kewarganegara pada periode kedua ini terdiri atas empat unsur (Ikeno, 2005:94), yaitu untuk mengembangkan:

1. Pengetahuan dan pemahaman
2. Keterampilan berpikir dan ketetapan
3. Keterampilan dan kemampuan, dan
4. Kemauan, minat, dan sikap warganegara

Pada periode ketiga, Pendidikan Jepang ditekankan pada pengembangan prinsip hubungan timbal balik. Dalam hal ini, pendidikan sekolah difokuskan untuk mengembangkan “kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan peserta didik”, dalam arti peserta didik mampu menemukan suatu masalah sendiri, belajar tentang permasalahan itu, memikirkannya, menilai dengan bebas, menggunakan metode yang tepat, memecahkan masalah secara tepat, kreatif, dan memperdalam pemahamannya tentang hidup. Sasaran ini dicapai melalui integrasi dari setiap disiplin ilmu. Karena itu, periode ini disebut sebagai “periode studi yang terintegrasi”.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam periode ketiga bertujuan mempersiapkan setiap individu untuk dapat terlibat dalam secara aktif dalam masyarakat, dan menggunakan

budaya umum dalam setiap hal. Penekanan Pendidikan Kewarganegaraan telah diubah dari mengutamakan pengetahuan umum tentang bangsa Jepang kepada kemampuan itu untuk membangun masyarakat. Pada periode ketiga ini, pendidikan Kewarganegaraan Jepang sebagian besar diterapkan sebagai “kewarganegaraan (civics)” dalam sekolah tingkat atas, dan sebagai “studi sosial” dalam sekolah tingkat menengah (Otsu, 1998:51).

Dalam uraian Otsu (1998:) Pendidikan Kewarganegaraan dalam sekolah dasar diimplementasikan sebagai “life and environmental studies” pada tingkat 1-2, dan “social studies” pada tingkat 3-6 untuk tiga jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) per minggu. Di sekolah menengah, studi sosial terdiri atas tiga mata pelajaran, Geografi (4 jam per minggu pada tingkat 1 dan 2, 1 jam = 50 menit), Sejarah (dengan proporsi yang sama dengan geografi), dan Kewarganegaraan (2-3 jam per minggu pada tingkat 3).

Isi (kurikulum) Kewarganegaraan pada sekolah menengah terdiri atas:

1. *Contemporary Social Life* (Kehidupan sosial kontemporer)
2. *Improvement Of National Life And Economy* (Perbaikan kehidupan nasional dan ekonomi)
3. *Democratic Government and International Community* (Pemerintahan demokratis dan masyarakat internasional)
(Otsu, 1998:54)

Pada sekolah menengah, para peserta didik belajar Kewarganegaraan pada tahun terakhir, pelajaran Kewarganegaraan tingkat tiga cenderung diarahkan sebagai pusat pengetahuan dan ditekankan terhadap hapalan (*memorization*), karena banyak peserta didik dan guru

berkonsentrasi untuk ujian masuk ke tingkat sekolah menengah atas. Kurikulum sekolah menengah atas terdiri atas bidang mata pelajaran dan sub mata pelajaran yang spesifik. Para peserta didik diharuskan mengambil empat kredit dari mata pelajaran Kewarganegaraan yang terdiri atas: masyarakat kontemporer (4 jam, 1 jam = 50 menit), etika (2 jam), dan politik/ekonomi (2 jam).

Isi dari kajian tentang masyarakat kontemporer adalah sebagai berikut:

1. *The Individual and Culture In Contemporary Society* (individu dan budaya dalam masyarakat kontemporer)
2. *Environment and Human Life* (lingkungan dan kehidupan manusia)
3. *Contemporary Politics and Economy and The Individual* (politik dan ekonomi kontemporer dan individual)
4. *International Community and Global Issues* (organisasi internasional dan isu-isu global) (Otsu, 1998:54).

F. Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

Pendidikan kewarganegaraan di Australia telah berumur lebih dari satu abad, dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai 1950-an. Namun, Pendidikan Kewarganegaraan tidak pernah jelas didirikan sebagai subjek independen dan memiliki batas-batas disiplin ilmu yang ambigu (Thomas, dalam Sukoco, 2016).

Kurikulum pendidikan Australia pada awal dan pertengahan abad kedua puluh, terfokus pada studi struktur dan proses pemerintahan dari formal dan perspektif konstitusional, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong pengembangan keterampilan masyarakat sipil. Prioritas Pendidikan Kewarganegaraan atau

yag dikenal dengan *civics and Citizenship Education* (CCE) adalah mengenai dasar-dasar konstitusional politik, sistem, dan struktur pemerintahan. Dalam hal ini, ranah kontitif pendidikan kewarganegaraan Australia tersebut, bisa dianggap sebagai dasar konstruksi formalistik pendidikan kewarganegaraan (Howard, dalam Sukoco, 2016).

Walau berakar pada nilai-nilai konstitusionalisme liberal, pendidikan kewarganegaraan lama memiliki lebih dari satu wajah politik atau ideologi. Dalam perihal hak-hak warga negara misalnya, konstruksi kewarganegaraan lama sering bersifat sangat konservatif. Adapun pendidikan kewarganegaraan pada pertengahan abad kedua puluh tampak dirancang untuk memperkuat status quo dengan menetralsir dukungan potensi tantangan perubahan-berorientasi pada politik dan tatanan sosial. Ada upaya untuk membangun masyarakat dan meringankan alienasi politik, sering dicapai melalui proses indoktrinasi yang bertujuan memastikan warga pasif dan diam (Howard 2006: 461). Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di New South Wales misalnya, sama sekali tidak membahas mengenai pentingnya pemikiran kritis dan liberal dalam menyikapi situasi politik, namun dijabarkan sebagai pelajaran dalam hal properti, kerajinan, ketepatan waktu, dan patriotisme (Howard, dalam Sukoco, 2016).

Konsep CCE di Australia pada sebelum periode tahun 1990-an bersifat sempit, formalistik, dan legalistik (Gill & Reid, dalam Sukoco, 2016). Bidang kewarganegaraan disamakan dengan pemilu, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait dengan sistem pemilu atau legislatif (Thomas, dalam

Sukoco, 2016). Namun, pada awal tahun 2003, *Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affairs* (MCEETYA) mengadakan kesepakatan untuk mengembangkan instrumen penilaian ujicoba pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan dengan sampel nasional seluruh peserta didik kelas 6 dan 10, yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2004. Paska kejadian September 2001 dan Oktober 2002, perhatian masyarakat semakin besar akan studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan atau dikenal dengan CCE. CCE lalu dianggap serius dalam kancah pendidikan nasional. Sebagai implikasinya, jika sebelumnya pendidikan kewarganegaraan hanya berfokus pada pemahaman lembaga & proses kewarganegaraan maka kini, fokus studi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan diperluas mencakup dua hal yaitu: 1) pemahaman lembaga & proses kewarganegaraan serta 2) watak & keterampilan untuk partisipasi.

Pendidikan Kewarganegaraan di Australia bukan merupakan subjek pembelajaran khusus sebagaimana yang ada di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menghasilkan hasil belajar yang berhubungan dengan berbagai masalah dan keterampilan, sehingga dapat bermakna jika dihubungkan ke area pembelajaran. Untuk memiliki dampak sosial yang lebih besar, maka hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibangun ke dalam semua kegiatan dan program kurikuler dan ekstrakurikuler.

G. Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika

Perkembangannya Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika dapat ditelusuri balik dimana pada saat *The National Education Association* membentuk kelompok untuk mengkaji

kurikulum sekolah lanjutan dan kemudian merekomendasikan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut dengan membentuk *The Civics Study* mengenai kekuatan dan kelemahan *civics*. Pertama mengusulkan perkembangan *community civics* sebagai mata pelajaran baru untuk kelas sembilan, yang berfungsi sebagai bekal peserta didik yang memasuki dunia kerja setelah kelas sembilan. Yang kedua, di kelas 12 dimana diusulkan adanya mata pelajaran mengenai permasalahan demokrasi (*problem of democracy*). Kedua matapelajaran itu dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui pengembangan keterampilan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang, sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat yang demokratis. Tujuan utama dari matapelajaran tersebut adalah untuk mengembangkan warga negara yang partisipatif (*to develop participatory*), sekalipun dalam prakteknya tujuan tersebut ternyata tidak dapat dicapai sepenuhnya. Yang tampak hanyalah pengetahuan tentang isi yang masih tetap bersifat problematik (Budimansyah, 2010 : 110).

Pembelajaran PKn di Amerika setidaknya memegang prinsip *what to think dan how to think*. Dimana paling tidak pembelajaran PKn menekankan pada dua hal penting yaitu, pertama bahan-bahan yang diberikan kepada peserta didik adalah bahan-bahan yang baik dan telah dipilih dan ditetapkan pemerintah sebagai matapelajaran yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Dan yang kedua adalah bahwa mata pelajaran tersebut haruslah memuat nilai-nilai yang berkenaan dengan patriotisme, nilai-nilai demokrasi seperti nilai-nilai

kejujuran, kemerdekaan, rasa hormat, kebebasan berekspresi. Semua unsur tersebut merupakan nilai-nilai dasar masyarakat dan merupakan bagian utama dari pendidikan kewarganegara

Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika pada awalnya didasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan pada saat itu, yaitu "*Faculty Psychologi*" yang menekankan pada teori yang menyatakan bahwa dalam pelajaran yang terpenting adalah "*mind and body*". Menurut teori ini apabila ada kekeliruan dalam belajar maka yang salah bukanlah terletak pada tubuh melainkan terletak pada pikiran, (Wahab Sapriya, 2011: 4). Teori ini mendukung pembelajaran PKn yang harus menekankan pada upaya melatih pikiran para pelajar dengan menghafal (*rote memory/memorization*), mengarahkan dan menasehati secara teratur dengan bahan yang baik, dimana cara ini lebih mengarah pada pengajaran civics dan PKn yang bersifat indoktrinasi atau *parrot like intruction*.

Sebagai negara perintis pengembangan konsep dan paradigma citizenship education yang pertama kalinya pada pertengahan tahun 1880-an yang mulai memperkenalkan mata pelajaran *civics* sebagai matapelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan. Pada tahun 1900-an, berkembang matapelajaran *civics* yang berisikan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal (Gross dan Zeleny dalam Budimansyah, 2010 : 108). Berikutnya Dunn (1915) mengembangkan gagasan new civics yang menitikberatkan pada *community living* atau kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai pada tahun 1920-an istilah civics telah digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus yaitu *vocational civics*,

community civics, dan economic civics atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian. Diantara tujuan dari mata pelajaran *civics* pada tahun 1900-an itu adalah pengembangan *social skill and civics competence* atau keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan *idea of good character* atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik, (Gross dan Zeleny (1958), Allen (1960), Best (1960) dalam Budimansyah, 2010 : 108).

Bab IV

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Capaian Pembelajaran: Dengan mempelajari konsep perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, mahapeserta didik dapat memahami perkembangan mulai dari sebelum proklamasi kemerdekaan, Sesudah Proklamasi kemerdekaan, dan Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang

A. Perkembangan PKn Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Pendidikan Kewarganegaraan sebelum proklamasi kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerkunde*. Pada waktu itu ada dua buku resmi yang digunakan, yaitu *Indische Burgerschapkunde* dan *Rech en Plich, Bambang Daroeso* (Cholisin, 2000: 2.11). Dari masing-masing buku tersebut dapat dijelaskan dengan lebih rinci isi atau apa yang dibicarakan dalam buku tersebut.

Pertama, dalam buku *Indische Burgershapkunde*, yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya: J. B. Wolter Maatschappy N.V. Groningen, Deen Haag, Batavia tahun 1934. Yang dibicarakan dalam buku tersebut adalah: masyarakat pribumi, pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan Hindia Belanda dan rumah tangga dunia, masalah pertanian, masalah perburuan, masalah kaum menengah dalam industri dan perdagangan, masalah kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan maupun pertumbuhannya dengan terbentuknya Dewan Rakyat (*Volks Raad*), hukum dan pelaksanaannya, masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat, masalah pajak, tentara dan angkatan laut. Kedua, *Rech en Plicht (Indische*

Burgerschappcunde Vooriedereen) karangan J.B Vortman dengan penerbitnya G.C.T van Dorp dan Co. N.V (Derde, Herzine en Verneerderdruk) Semarang-Surabaya-Bandung, tahun 1940. Dibicarakan dalam buku tersebut yaitu: Badan pribadi yang mengutarakan antara lain masyarakat dimana kita hidup, dari lahir sampai ke dewasanya, pernikahan dan keluarga serta setelah badan pribadi itu tiada, masalah bezit dari objek hukum dimana dibicarakan antara lain: eigendom eropah dan hak-hak atas tanah, hak-hak agrarisch atas tanah, masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintahan Hindia Belanda, masalah perundang-undangan, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan.

Lewat pengajaran *Burgerkende* (Cholisin, 2000: 2.11) lebih lanjut menjelaskan bahwa pelajaran ini dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (*My enemi is goverment*) tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (*Diffuese support*). Meskipun pada waktu itu, bangsa Indonesia dijajah namun konsep tentang pendidikan politik maupun pelaksanaannya lewat pendidikan formal dan non formal tetap berlangsung.

Pendidikan politik lewat pendidikan formal/sekolah pada masa pergerakan nasional, terutama dilakukan oleh guru-guru sekolah partikelir. Sejarahwan Abdurrachman Surjomihardjo, menggambarkan hal tersebut sebagai berikut: "sekolah partikelir memang mempunyai ciri tersendiri". Ada yang memang ingin memberikan pengetahuan secara murni, tetapi

ada pula yang menanamkan paham demokrasi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah kolonial mengetahui hal ini sehingga beberapa sekolah liar ditutup.

Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan, yang disetujui Volksraad, bahwa setiap guru harus memiliki izin. Dasar pertimbangannya adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru sekolah partikelir, alasan larangan itu terlalu dicari-cari. Tapi memang benar dimuka kelas guru-guru itu memberikan pendidikan politik. Secara prinsipil guru-guru kebangsaan menolak peraturan itu (Cholisin, 2000: 2.12).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa sebelum refomasi PKn dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (*My enemy is goverment*), tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (*Disffusi support*). Namun dalam perjalanannya dalam sekolah partikelir selain ada yang memberikan pengetahuan secara murni tetapi ada beberapa guru sekolah partikelir yang bertujuan menanamkan paham demokarsi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang hasilnya dapat menumbuhkan semangat kebangsaan diantara penduduk pribumi tersebut.

B. Perkembangan PKn Sesudah Proklamasi kemerdekaan

Cholisin (2000: 2.15) secara lebih rinci melacak sejarah dan perkembangan PKn. Sekiranya dapatlah diketengahkan sejarah PKn dan perkembangannya secara lebih lengkap sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan (1957)

Pendidikan moral di Indonesia secara tradisional, berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat dan agama. Pada mulanya, pendidikan moral dilaksanakan melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Tak ada pendidikan moral secara eksplisit. Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Di samping itu, dari sudut pengetahuan tentang negara diperkenalkan juga mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga mata pelajaran tersebut semata-mata beraspek kognitif (Cholisin, 2000: 2.15).

2. *Civics* sebagai pengganti Kewarganegaraan (1959)

Pada tahun 1959 terjadi arah perubahan arah politik dinegara Indonesia, UUDS 1950, tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, Nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini adalah diperkenalkannya pelajaran *Civics* di SMP dan SMA, yang isinya meliputi Sejarah Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, Pancasila, Pidato-pidato Kenegaraan Presiden. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang digunakan adalah "*Civic Manusia Indonesia Baru*" dan "**Tujuh Bahan Pokok Indokritinasi**" yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat Indokritinasi. Buku pegangan untuk murid belum ada (Cholisin, 2000: 2.15), TUBAPI isinya meliputi. Lahirnya Pancasila, UUD 1945, Manipol, merupakan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan

Kembali Revolusi Kita”, yang intinya ditegaskan pada pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 meliputi caturlogi, yaitu: Semangat nasional, Konsepsi nasional, Keamanan nasional, Perbuatan nasional. JAREK (Jalan Revolusi Kita), Pidato Presiden RI di depan Sidang Umum PBB 30 September 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru” (*The World A New*) dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah berdirinya GNB (Gerakan Non Blok). MANIPOL-USDEK, Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana di depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960 (Cholisin, 2000: 2.16).

3. Kewargaan Negara (1962)

Lebih lanjut Cholisin, (2000: 2.16) menjelaskan bahwa pada tahun 1962 dengan istilah Civics diganti dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahardjo, S.H yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan itu didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik. Kemudian pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30S/PKI, yang kemudian diikuti dengan pembaharuan tatanan dalam pemerintah. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh tonggak yang resmi dengan diserahkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Suharto. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Baru, yang mengandung tekad untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perubahan sistem ketatanegaraan/pemerintahan ini kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri P & K No.

31/1967 yang menetapkan bahwa pelajaran Civics isinya terdiri atas: a). Pancasila, b). UUD 1945 c). Ketetapan-ketetapan MPRS d). Pengetahuan tentang PBB (Cholisin, 2000: 2.16).

4. Pendidikan Kewargaan Negara (1968)

Dengan ditetapkannya Kurikulum 1968, maka mata pelajaran Kewargaan Negara (1962) diganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKn). Menurut Ali Emran (1976: 4) isi PKn meliputi: a). Untuk Sekolah Dasar : Pengetahuan Kewargaan Negara, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi, b). Untuk SMP, Pancasila, Ketetapan-ketetapan MPRS, c). Untuk SMA : Uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi. Kemudian pada tahun 1970 PKN difusikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran yang difusikan meliputi: PKn, Sejarah, Ilmu Bumi, Ekonomi, Antropologi Budaya, Sosiologi dan Hukum.

5. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) (1972)

Pada tahun 1972, diadakan Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics, di Tawangmangu-Surakarta. Hasilnya, antara lain menetapkan istilah Ilmu Kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti istilah Civics, dan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) sebagai pengganti istilah Civics Education. IKN merupakan disiplin ilmu dan PKN merupakan program pendidikan. IKN sebagai disiplin ilmu menyediakan deskripsi peranan warganegara, dan PKN sebagai program pendidikan bertugas membina peranan tersebut. Dengan demikian IKN lebih bersifat teoritis dan PKN lebih bersifat praktis. Antara keduanya

merupakan kesatuan tak terpisahkan, karena perkembangan PKN sangat tergantung pada perkembangan IKN (Choisin, 2000: 2.17). Cholisin kemudian menjelaskan bahwa Hasil Seminar Tawangmangu tersebut, tampaknya sangat berpengaruh pada perkembangan PKN berikutnya. Buktinya, antara lain meskipun diberlakukannya Kurikulum 1975, PKN diganti dengan mata pelajaran PMP, namun baik kewargaan negara dan PKN tetap dimunculkan sebagai mata kuliah di Program S1 PMP di IKIP dan FKIP lewat kurikulum 1982. Diberikannya mata kuliah tersebut, diharapkan dapat memberikan kemampuan “menguasai bahan pendalaman bidang studi PMP” (Depdikbud Ditjen Dikti, 1982: 52-55). Dengan demikian secara implisit IKN dan PKN ada pada mata pelajaran PMP. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan IKN dan PKN merupakan bagian dari PMP.

6. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (1989)

Dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan Nasional). Bab IX tentang kurikulum, pasal 39 dinyatakan sebagai berikut.

- 1) Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- 3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: 1). Pendidikan Pancasila, 2). Pendidikan Agama, 3).

Pendidikan Kewarganegaraan, 4). Bahasa Indonesia, 5). Membaca dan Menulis, 6). Matematika (Termasuk berhitung), 7). Pengantar Sain dan teknologi, 8). Ilmu Bumi, 9). Sejarah nasional dan sejarah umum, 10). Kerajinan tangan dan kesenian, 11). Pendidikan jasmani dan kesehatan, 12). Menggambar, serta 13). Bahasa Inggris.

- 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2), dinyatakan sebagai berikut: Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat. Serta perilaku yang mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat. Serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan antara lain melalui Pendidikan Kewiraan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut: Sebutan-sebutan tersebut pada ayat (3) bukan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu unsur tersebut dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran. Usur-unsur kemampuan pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pendidikan dasar harus mencakup sekurang-kurangnya semua kemampuan tersebut.

Dari ketentuan pasal 39 dan penjelasannya, dapat dinyatakan sebagai berikut.

- a) PKn bersama dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama, merupakan program pendidikan dasar umum.
- b) PKn dapat berdiri sendiri karena misi dan skopnya ditegaskan berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama (Lihat penjelasan pasal 39 ayat (2)).
- c) PKn dimungkinkan untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran lain (Lihat penjelasan pasal 39 ayat (3)).

7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menurut Kurikulum 1994.

Kurikulum 1994, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2/1989, memilih mengintegrasikan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Menurut kurikulum 1994, fungsi PPKn, meliputi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a) Melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
- b) Mengembangkan dan membina peserta didik menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik,

hukum, dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

- c) Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antar warga negara dengan sesama warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- d) Membekali peserta didik dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Cholisin (2000:2.20) menganalisis bahwa Pendidikan Pancasila (PP) lebih menekankan pada misi pendidikan moral (moral education), maka fungsi pertama (a) merupakan fungsi Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang merupakan pendidikan politik yang memiliki misi utama meningkatkan kesadaran politik maupun kesadaran hukum, maka fungsi kedua (b) dan fungsi ketiga (c) merupakan tugas yang harus diembannya. Sedangkan fungsi keempat (d) merupakan fungsi yang harus diemban baik oleh pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam praktek fungsi keempat fungsi itu dilaksanakan secara terpadu, karena Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan telah diintegrasikan.

C. Perkembangan PKn Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang

PKn sebagai pemberdayaan warga negara, akan selalu relevan dalam masyarakat demokratis sampai kapanpun. Agenda reformasi untuk mengembangkan masyarakat madani (*Civil society*) merupakan hasil dari pemberdayaan warga

negara. Oleh karena itu, sebenarnya orientasi IKn-PKn akan memperkuat berkembangnya *Civil society*. Suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan kesukarelaan, swasembada dalam ekonomi, berswadaya dalam politik, memiliki kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan memiliki keterikatan terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya, Muhammad AS Hikam (Cholisin, 2000: 2.23).

Secara lebih sederhana maka perkembangan PKn adalah sebagai berikut pada kurikulum tahun 1989, Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang SPN Pasal 39 ayat 2, yaitu pancasila yang mengarah pada moral, tentunya diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2 Tahun 1989, yaitu memilih mengintegrasikan antara pengajaran pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan mejadi PPKn. Kurikulum tahun 2004/kurikulum KBK juga membawa perubahan nama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, isinya meliputi beberapa aspek yaitu, Pancasila, persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, dan globalisasi.

Tetapi dengan adanya perubahan UU No. 2 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional nama Pendidikan Pancasila tidak dieksplisitkan lagi, sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan ini juga nampak

diikuti dengan perubahan Isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.

Perkembangan paradigma PKn yang sejalan dengan tuntutan era reformasi dan yang sekarang dikembangkan dengan standar isi. Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, filsafat moral/filsafat pancasila dan memiliki visi yang kuat *nation and karakter building, citizen empowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat kewargaan) yang memiliki arti penting dalam pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem politik demokratis. Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, memiliki visi untuk memperkuat (*state building*) (Negara otoriter birokratis) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Akibat dari kondisi tersebut, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis (Cholisin, 2008: 10).

Rancangan pengembangan kurikulum 2013 yang akan diterapkan disekolah menjadikan posisi PKn sangat diprioritaskan bahkan masuk kedalam mata pelajaran yang wajib. Untuk peserta didik sekolah dasar PKn berubah nama dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk tingkat SMP sama dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk tingkat SMA nama PKn tetap

mejadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam (Bahan Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013, Kemendikbud) terdapat penambahan alokasi waktu pada mata pelajaran PKn yaitu untuk tingkat SD dari dua jam mata pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, untuk SMP juga sama dari dua jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, sementara untuk SMA tetap dua jam pelajaran.

Bab V

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar

Capaian Pembelajaran: Dengan mempelajari konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar, mahapeserta didik mampu memahami teori Belajar dan Pembelajaran, *Thinking Skills* dalam Pembelajaran PKn SD, dan *Affective Teaching* dalam Pembelajaran PKn SD

A. Belajar dan Pembelajaran

Belajar adalah pengkonstruksian pengetahuan oleh individu-individu sebagai pemberian makna atas data sensori dalam hubungannya dengan pengetahuan sebelumnya (Shymansky & Kyle, 1992). Sejalan dengan pendapat Shymansky & Kyle, Tasker (1992) berpendapat bahwa Belajar adalah pembentukan makna secara aktif oleh peserta didik dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dan masukan-masukan data sensori baru serta pembuatan hubungan-hubungan dalam pembentukan makna. Howard L. Kingsley berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan, perubahan tingkah laku akan memberikan pengalaman kepada peserta didik, pengalaman yang didapat peserta didik merupakan hasil dari belajar (Djamarah, 1999). Oemar Hamalik (2008:36) berpendapat bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku

peserta didik yang diperoleh melalui pengalaman belajar, hasil pengalaman belajar inilah yang dinamakan belajar.

Belajar memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Tingkah laku terminal, yaitu penentuan tingkah laku peserta didik setelah belajar
2. Kondisi-kondisi tes, yaitu penentuan situasi dimana peserta didik dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal
3. Ukuran-ukuran perilaku, yaitu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku peserta didik

(Hamalik, 2008: 73-75)

Adapun ciri-ciri atau prinsip-prinsip belajar antara lain sebagai berikut:

1. Belajar merupakan perubahan yang terjadi secara sadar
2. Perubahan yang terjadi dalam belajar bersifat fungsional
3. Perubahan dalam belajar memiliki sifat positif dan aktif
4. Perubahan dalam belajar tidak memiliki sifat sementara
5. Perubahan dalam belajar memiliki tujuan yang terarah
6. Perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek tingkah laku

(Djamarah, 2002: 15)

Proses Belajar menurut Gagne terbagi menjadi delapan jenis belajar. Kedelapan jenis belajar tersebut, antara lain:

1. Belajar Isyarat

Belajar isyarat adalah kegiatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan dikarenakan adanya tanda atau isyarat. Misalnya, berhenti mengendarai kendaraan ketika melihat tanda lampu merah.

2. Belajar *Stimulus-Respons*

Belajar *stimulus-respons* adalah aktivitas belajar yang terjadi pada diri individu dikarenakan ada rangsangan dari luar. Misalnya, menendang bola apabila ada bola didepan kaki

3. Belajar Rangkaian

Belajar rangkaian adalah perpaduan dari berbagai proses stimulus-respons (S-R) yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku spontan, seperti hitam-putih, bapak-ibu, merah-putih, dsb.

4. Belajar Asosiasi Verbal

Belajar asosiasi verbal merupakan proses pemaknaan yang bersifat verbal. Contoh : kereta api bentuknya seperti binatang berkaki seribu, wajah anak itu seperti bulan kesiang.

5. Belajar Membedakan

Belajar membedakan adalah proses membedakan atau membandingkan tentang suatu benda dan keadaan berupa pengalaman yang pernah ditemui. Contoh: membedakan jenis tumbuhan atas dasar urat daunnya, suku bangsa menurut tempat tinggalnya, dan Negara menurut tingkat kemajuannya.

6. Belajar Konsep

Belajar konsep adalah suatu proses belajar tentang berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Misalnya, binatang, tumbuhan, dan manusia termasuk makhluk hidup, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara termasuk hukum internasional.

7. Belajar Hukum atau Aturan

Belajar hukum adalah proses belajar dengan menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Contoh: iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan geografi dan astronomi di muka bumi, harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, dsb.

8. Belajar Pemecahan Masalah

Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Misalnya, mengapa minat masuk perguruan tinggi menurun. Proses pemecahan masalah selalu bersegi jamak dan satu sama lain saling berkaitan.

(Winataputra, 2007)

Pembelajaran menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan pengertian tersebut, Sagala (2011:62) berpendapat bahwa, Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sedangkan usman (2012: 12), berpendapat bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan guru dengan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pendapat pembelajaran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh guru kepada peserta

didik dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran.

Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran, yaitu :

1. Komponen tujuan

Komponen tujuan merupakan sasaran dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus merumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya.

2. Materi pelajaran

Komponen materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran dengan kata lain bahwa dalam pembelajaran merupakan proses penyampaian materi. Oleh sebab, guru harus memahami dan menguasai secara detail isi materi pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik.

3. Metode pembelajaran

Komponen metode pembelajaran merupakan suatu cara berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus mampu memahami, dan menerapkan metode pembelajaran secara tepat dalam proses belajar mengajar.

4. Sumber belajar

Komponen sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi berupa definisi, teori, konsep, dan penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus mampu memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar peserta didik, terutama lingkungan disekitar sekolah.

5. Evaluasi pembelajaran

Komponen evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran yang tidak dapat ditinggalkan, karena evaluasi berhubungan erat dengan tujuan instruksional, analisis kebutuhan dan proses belajar mengajar. Tanpa evaluasi suatu sistem instruksional masih dapat dikatakan belum lengkap. Oleh sebab itu, guru harus mampu menyusun alat evaluasi yang reliabel sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Selain komponen-komponen pembelajaran, dalam pembelajaran terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar (Syah, 2005). Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi:

a) Faktor Fisiologis

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan atas dua macam . Pertama, kondisi fisik atau keadaan tonus jasmani, pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Kedua, keadaan fungsi jasmani/fisiologis. Selama proses belajar berlangsung fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat memengaruhi hasil belajar terutama pancaindra.

b) Faktor Psikologis

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi proses belajar, yaitu :

1) Kecerdasan/intelegensi peserta didik

Kecerdasan merupakan faktor yang paling penting dalam proses belajar peserta didik, karena itu menentukan kualitas belajar peserta didik. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru atau profesional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasan peserta didik.

Para ahli membagi tingkatan IQ bermacam-macam, salah satunya adalah penggolongan tingkat IQ berdasarkan tes Stanford-Binet yang telah direvisi oleh Terman dan Merrill sebagai berikut.

Tabel.

Klasifikasi Tingkat Kecerdasan (IQ)

Tingkat Kecerdasan (IQ)	Klasifikasi
140-169	Amat Superior
120-139	Superior
110-119	Rata-rata tinggi
90-109	Rata-rata
80-89	Rata-rata rendah
70-79	Batas lemah mental
20-69	Lemah mental

Dari tabel di atas, dapat diketahui penggolongan tingkat kecerdasan manusia.

2) Motivasi

Motivasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan belajar peserta didik. Motivasi mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi intrinsik sebagai proses di dalam diri individu yang aktif mendorong, memberi arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar diri individu tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar.

3) Minat

Secara sederhana, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Untuk membangkitkan minat belajar peserta didik tersebut, banyak cara yang bisa digunakan. Pertama, dengan membuat materi yang akan dipelajari menjadi materi yang sangat menarik dan tidak membosankan. Kedua, pemilihan jurusan atau bidang studi yang dipilih sendiri oleh peserta didik sesuai dengan minatnya.

4) Sikap

Dalam belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Sikap

adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.

5) Bakat

Secara umum bakat (*aptitude*) didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan belajar, Slavin (1994) mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki individu untuk belajar. Dengan demikian, bakat adalah kemampuan dasar individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa tergantung upaya pendidikan dan latihan.

2. Faktor Eksternal

Selain karakteristik peserta didik tau faktor-faktor internal/endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Faktor-faktor eksternal dalam belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu lingkungan sosial dan nonsosial. Lingkungan sosial merupakan pengaruh yang datang atau berasal dari manusia. Lingkungan sosial peserta didik meliputi orang tua, keluarga, masyarakat dan tetangga, serta teman-teman sepermainan di sekitar rumah peserta didik. Sifat-sifat lingkungan sosial dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh peserta didik. Lingkungan nonsosial meliputi lingkungan alamiah

seperti keadaan alam, udara, suhu udara, cuaca, waktu, serta faktor instrumental yang mencakup tempat belajar, gedung, maupun buku-buku pelajaran.

B. *Thinking Skills* dalam Pembelajaran PKn SD

Keterampilan berpikir dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang dipecah-pecah ke dalam langkah-langkah nyata yang kemudian digunakan sebagai pedoman berpikir. Satu contoh keterampilan berpikir adalah menarik kesimpulan (*inferring*), yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan berbagai petunjuk (*clue*) dan fakta atau informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki untuk membuat suatu prediksi hasil akhir yang terumuskan. Untuk mengajarkan keterampilan berpikir menarik kesimpulan tersebut, pertama-tama proses kognitif *inferring* harus dipecah ke dalam langkah-langkah sebagai berikut: (a) mengidentifikasi pertanyaan atau fokus kesimpulan yang akan dibuat, (b) mengidentifikasi fakta yang diketahui, (c) mengidentifikasi pengetahuan yang relevan yang telah diketahui sebelumnya, dan (d) membuat perumusan prediksi hasil akhir.

Terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir, yang sebenarnya cukup berbeda; yaitu berpikir tingkat tinggi (*high level thinking*), berpikir kompleks (*complex thinking*), dan berpikir kritis (*critical thinking*). Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang banyak dibutuhkan pada proses-proses berpikir yang terjadi dalam short-term memory. Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir tingkat tinggi meliputi evaluasi, sintesis, dan analisis. Berpikir kompleks adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Berpikir kritis merupakan salah satu jenis

berpikir yang konvergen, yaitu menuju ke satu titik. Lawan dari berpikir kritis adalah berpikir kreatif, yaitu jenis berpikir divergen, yang bersifat menyebar dari suatu titik.

Keterampilan berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua jenis berpikir ini disebut juga sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi (Liliasari, 2002). Berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses mengambil keputusan untuk memecahkan masalah dengan menganalisis dan menginterpretasi data dalam kegiatan inkuiri ilmiah. Sedangkan berpikir kreatif adalah proses berpikir yang menghasilkan gagasan asli atau orisinal, konstruktif, dan menekankan pada aspek intuitif dan rasional (Johnson, 2000). Pemahaman umum mengenai berpikir kritis, sebenarnya adalah pencerminan dari apa yang digagas oleh John Dewey sejak tahun 1916 sebagai inkuiri ilmiah dan merupakan suatu cara untuk membangun pengetahuan.

Keterampilan berpikir dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah Dasar, membutuhkan teknik pembelajaran yang sesuai. Adapun teknik pembelajaran keterampilan berpikir yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar, antara lain sebagai berikut:

1. Sebab akibat (*Cause and Effect*)

Kegiatan ini dirancang untuk membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik dalam menentukan sebab dan akibat. Keterampilan menentukan sebab dan akibat bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dalam mencari tahu tentang sebab dan akibat sesuatu

terjadi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh berikut ini:

- 1) Pemilik rumah yang perlu mencari penyebab lantai dasar basah
- 2) Guru mencari penyebab peserta didik berkata bohong
- 3) Peserta didik yang sedang mempertimbangkan dampak mengambil barang milik orang lain
- 4) Guru yang mencari efek kurikulum baru di bidang moral

Dalam menggunakan teknik ini dibutuhkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kejadian atau tindakan yang akan dianalisis
- 2) Tentukan apakah lebih penting untuk menemukan sebab atau akibat dari situasi ini
- 3) Mengidentifikasi tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut
- 4) Gunakan teknik pengumpulan informasi yang tepat untuk mempertimbangkan semua kemungkinan penyebab atau efek, dan
- 5) Menggunakan data sebagai bukti, menentukan penyebab atau efek yang paling mungkin atau kuat.

Jika peserta didik mengalami kesulitan dengan salah satu atau semua prasyarat ini, mereka mungkin adalah peserta didik baru dengan keterampilan ini dan kemungkinan mereka membutuhkan instruksi eksplisit dari guru meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan sebab dan akibat. Sudah pengalaman kami yang banyak Peserta didik mengalami kesulitan dengan keterampilan ini, bukan karena mereka tidak dapat

memilih penyebab yang mungkin dan efek, tapi karena mereka tidak dapat menentukan mana dari mereka yang paling mungkin atau paling kuat, atau tidak sadar akan tujuan mereka untuk menentukan sebab dan akibat. Kapan ini terjadi, peserta didik tidak memperhatikan faktor, tindakan, atau kejadian terpenting yang harus dilakukan biasanya memandu proses berpikir seorang pemikir yang lebih ahli dan kesimpulan atau keputusan mereka menderita sebagai hasilnya. Di lain waktu, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dengan keterampilan ini karena mungkin berpikir mereka tertutup oleh pengalaman sebelumnya atau oleh pendapat negatif dari orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan strategi sebagai berikut:

- a. Untuk menjadi baik dalam menentukan sebab dan akibat, seseorang harus mengidentifikasi kejadian atau tindakan tersebut untuk dianalisis dan memutuskan apakah lebih penting untuk menentukan penyebabnya atau efek. Identifikasi kejadian atau tindakan terkait perlu dilakukan secara terbuka pikiran. Penyebab atau dampak penting dapat diabaikan jika semua aspek situasi tidak dianggap.
- b. Penentuan penyebab dan efek yang efektif juga tergantung pada beberapa pengetahuan sebelumnya tentang area konten yaitu fokus analisisnya. Penelitian lebih lanjut mungkin perlu dilakukan untuk memahami situasi dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan sebab atau akibat.
- c. Orang yang pandai menentukan sebab dan akibat penggunaannya. Berbagai teknik untuk

mengembangkan sejumlah penyebab atau efek. Pemeriksaan fisik benda mungkin terjadi dilakukan, observasi cermat terhadap kejadian atau tindakan dilakukan, dan materi cetak dikonsultasikan. Survei, wawancara, konferensi, pengulangan pengamatan dari waktu ke waktu, atau percobaan atau simulasi juga merupakan cara yang bagus untuk melakukannya mengumpulkan data untuk membantu menentukan sebab dan akibat.

- d. Orang yang pandai menentukan sebab dan akibat harus membuat catatan dan catatan rinci dan sistematis tentang kejadian, tindakan, atau objek yang mungkin terkait dengan acara yang sedang dianalisis. Grafik atau penyelenggara grafik mungkin bisa membantu untuk mengatur data tentang kejadian yang diklasifikasikan.

2. Pengambilan keputusan (*Decision Making*)

Kegiatan di dirancang untuk membantu peserta didik dari semua tingkat kemampuan meningkatkan keterampilan mereka dalam pengambilan keputusan. Untuk keperluan unit ini, keputusan Pembuatan didefinisikan sebagai kemampuan untuk sampai pada kesimpulan setelah pertimbangan cermat fakta atau ide, kemungkinan alternatif dan kriteria, mungkin konsekuensi, dan nilai-nilai pribadi. Meski pembuatan keputusan dimulai Dengan kesadaran bahwa ada kebutuhan, hal itu berbeda dari pemecahan masalah karena tidak ada solusi yang tepat.

Ada banyak jenis keputusan yang kita hadapi setiap hari. Ini termasuk keputusan pribadi, keputusan

profesional, dan bisnis keputusan. Keputusan selalu melibatkan dua atau lebih pesaing alternatif tindakan. Salah satu aspek keputusan yang lebih sulit pembuatannya adalah kita sering harus membuat keputusan dengan data yang hilang. keputusan.

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan temuan pertimbangan atau kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif. Sering pertimbangan ini tidak akan sama pentingnya dengan pengambil keputusan dan oleh karena itu harus ditimbang sesuai dengan itu. Dengan menggunakan kriteria ini, pengambil keputusan akan berpikir dengan hati-hati tentang masing-masing alternatif dan menentukan seberapa baik masing-masing alternatif memenuhi pertimbangan terdaftar. Akhirnya, peringkat keseluruhan ditentukan dan alternatif terbaik diidentifikasi.

Pengambilan keputusan dapat digunakan di bidang akademik atau bidang karir. Tujuan keputusan Pembuatan bisa sama bervariasi. Biasanya, pengambil keputusan mencoba melakukan salah satu dari yang berikut:

- a. Memutuskan antara alternatif yang bersaing
- b. Menilai risiko yang terkait dengan berbagai keputusan
- c. Pilih tindakan yang tepat
- d. Memutuskan apakah atau tidak untuk mengejar satu alternatif
- e. Bandingkan alternatif, dan
- f. Memutuskan tindakan di masa depan.

Keterampilan ini biasanya digunakan bersamaan dengan kemampuan berpikir lainnya untuk sampai pada

solusi masalah atau mencari alternatif terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Contoh keterampilan ini meliputi berikut:

- a. Peserta didik yang memilih proyek sains yang adil
- b. Orang tua yang membeli mobil baru
- c. Bisnis yang sedang mempertimbangkan apakah akan memperpanjang inventaris mereka
- d. Guru yang memilih bahan ajar untuk digunakan di kelas mereka, dan
- e. Mahapeserta didik yang sedang memilih pekerjaan atau bidang studi.

Bagi peserta didik untuk menggunakan keterampilan pengambilan keputusan, mereka harus melakukan hal-hal berikut:

- a. Menyadari bahwa ada kebutuhan
- b. Menyadari bahwa ada beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan ini
- c. Mengidentifikasi beberapa alternatif
- d. Pilih kriteria obyektif yang akan membantu untuk memilih alternatif, memberi peringkat masing-masing alternatif dan menentukan seberapa baik masing-masing alternatif memenuhi kriteria, dan
- e. Membenarkan alasan pilihan berdasarkan kriteria suara. Jika peserta didik mengalami kesulitan dengan salah satu atau semua prasyarat ini, kemungkinan mereka akan membutuhkannya

Instruksi eksplisit dari guru untuk meningkatkan kemampuan mereka membuat keputusan. Pengalaman kami bahwa banyak peserta didik mengalami kesulitan dengan keterampilan ini, bukan karena mereka tidak bisa

Sampai pada keputusan, tapi karena mereka mengambil keputusan kecil tanpa banyak pemikiran, seperti apa yang harus dipakai, apa yang harus dimakan untuk sarapan, celana jins mana ke sekolah, atau film apa yang disewakan Mereka sering percaya itu Pemikiran serupa bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Jarang apakah kita menghabiskan waktu berdiskusi dengan anak prosesnya yang digunakan untuk mencapai keputusan kecil ini dan juga keputusannya Bergerak menuju membuat keputusan yang lebih kompleks, mereka kekurangan memahami bagaimana proses pengambilan keputusan dipekerjakan. Di lain waktu, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dengan keterampilan ini karena mereka telah salah mengidentifikasi tujuan atau tujuannya

Merumuskan keputusan dengan cara yang sempit seperti itu tidak mampu melakukan brainstorming banyak solusi atau alternatif. Kapan Hal ini terjadi, peserta didik mungkin perlu diarahkan untuk mencari cara alternatif untuk menyatakan tujuan dan dalam memahami itu Keputusan yang berbeda akan menghasilkan solusi yang berbeda.

Kesulitan lain yang umum terjadi dengan penggunaan keterampilan ini adalah peserta didik mungkin secara prematur memilih solusi atau ide alternatif dan akibatnya menolak untuk memeriksa data yang tidak konsisten dengan ide atau solusi yang mereka pertimbangkan. Mereka harus didorong untuk memikirkan manfaat dan kekurangan yang terkait dengan setiap solusi sebelum mereka membuat keputusan akhir mereka.

Terakhir, pengambilan keputusan selalu melibatkan ketidakpastian. Peserta didik harus hati-hati mempertimbangkannya bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi keputusan lain. Untuk melakukan ini, peserta didik harus didorong untuk melakukannya melakukan penelitian tambahan Dengan demikian, pembuat keputusan yang baik harus bisa menolak prematur Penutupan, penelitian masalah yang sedang diteliti untuk memahami manfaat dan kekurangannya, Masalahnya, identifikasi alternatif yang berusaha menjawab kebutuhan, rela tetap bersikap objektif selama peringkat solusi, dan mempertimbangkan kemungkinan dampak keputusan. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan strategi sebagai berikut:

- a. Untuk menjadi pengambil keputusan yang baik, orang harus terlebih dahulu menyadari bahwa sebuah keputusan perlu dibuat. Ini tahap perseptual mengharuskan peserta didik membuat pernyataan ringkas tentang tujuan atau kebutuhan yang akan dilakukannya pandu sesi brainstorming berikutnya untuk mengidentifikasi semua kemungkinan alternatif yang mungkin terjadi jawab kebutuhannya Penting agar peserta didik tetap berpikiran terbuka selama alternatif ini tahap generasi dan menahan diri untuk mengevaluasi alternatifnya.
- b. Kemampuan mengenali kebutuhan untuk membuat keputusan juga tergantung pada beberapa sebelumnya pengetahuan dengan bidang konten yang menjadi fokus keputusan. Bila sedikit informasi diketahui tentang tujuan yang sedang diselidiki,

peserta didik mungkin salah mengidentifikasi kebutuhan atau batasi alternatif yang mereka anggap karena prasangka atau data yang tidak akurat. karena kebanyakan keputusan multifaset, ada beberapa alternatif untuk dievaluasi, masing-masing memiliki kelebihan dan kerugian. Oleh karena itu, pemahaman akan konten yang mendasari keputusan akan membuat peserta didik melakukan brainstorming alternatif yang mungkin, menghasilkan pertimbangan atau kriteria yang akan terjadi membantu memandu proses pengambilan keputusan, dan mengidentifikasi hubungan antar variabel itu

- c. Pembuat keputusan yang baik juga menyadari bahwa menggunakan kriteria untuk membuat keputusan adalah proses itu meningkatkan evaluasi yang adil. Oleh karena itu, kriteria menjadi standar, aturan, ujian, atau sarana untuk menentukan keputusan atau keputusan. Kriteria bagus datang dari banyak sumber, termasuk akumulasi pengetahuan, nilai dan sikap, persepsi, perasaan, dan pengamatan. Seorang pengambil keputusan yang baik bergantung pada kriteria karena banyak alasan;
 - 1) Untuk menyaring gagasan atau pilihan yang mungkin tidak layak dipertimbangkan;
 - 2) Untuk membantu membandingkan semua alternatif;
 - 3) Untuk mendukung pilihan yang dipilih;
 - 4) Untuk membandingkan keinginan (keinginan) dengan tuntutan (kebutuhan);

- 5) Untuk menentukan kekuatan dan kelemahan relatif dari semua alternatif menggunakan satu set atribut yang umum untuk semua pilihan; dan
 - 6) Menolak pilihan yang tidak ingin dipertimbangkan oleh pengambil keputusan.
- d. Pembuat keputusan yang baik akan belajar mengandalkan kriteria atau pertimbangan untuk membantu membimbing keputusan atau pemilihan alternatif. Mereka akan menyadari hal itu karena ada yang penting. Keputusan mungkin berpengaruh pada orang lain, pengambil keputusan perlu hati-hati pertimbangan hasil keputusan mereka sebelum mengambil tindakan. Tujuan penggunaan kriteriaterkait dengan keputusan tersebut
3. Membandingkan dan kontras (*Comparing and Contrasting*)

Kegiatan ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan peserta didik dalam hal membandingkan dan mengkontraskan. Perbandingan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencari kesamaan dalam seperangkat objek atau konsep. Untuk kontras adalah dengan melihat satu objek atau konsep dan kemudian tekankan perbedaan mereka. Membandingkan dan akan mencakup persepsi dan penamaan kualitas Hadir dalam benda, seperti warna, panjang, dan ketebalan. Anda juga bisa membandingkan dan kontras dengan menentukan elemen mana dalam dua benda itu pernyataan tentang tingkat kesamaan. Pada tingkat konseptual, pengertian dan kemampuan untuk membedakan antara konsep kesamaan dan perbedaan

adalah prasyarat untuk mencatat hal ini termometer, dll. Membandingkan dan membedakan dapat digunakan di bidang subjek manapun. Tujuan pembuatan. Perbandingan dan kontrasnya adalah:

- a. Memfasilitasi interaksi yang efektif dengan lingkungan
- b. Lebih tepat dalam menggambarkan suatu objek atau konsep tertentu
- c. Membedakan dua objek atau konsep; dan
- d. Membantu individu mengatur informasi baru dan diketahui dengan menetapkan bagaimana keadaan mungkin terkait

Bagi peserta didik untuk menggunakan keterampilan membandingkan dan membedakan, mereka harus bisa melakukan hal berikut:

- 1) Memahami perbedaan antara yang serupa dan berbeda
- 2) Mengidentifikasi tujuan untuk membandingkan dan membandingkan
- 3) Mengidentifikasi atribut dan karakteristik yang relevan
- 4) Perhatikan kemiripan dan perbedaan
- 5) Melakukan pengamatan, dan
- 6) Merumuskan pernyataan yang merangkum temuan.

Membuat perbandingan sederhana cukup mudah. Peserta didik sering mengalami kesulitan dengan keterampilan ini saat membuat beberapa perbandingan. Kesulitannya mungkin karena mereka tidak menyelaraskan informasi untuk setiap perbandingan dan mungkin gagal untuk merumuskan pernyataan mengenai kesamaan dan perbedaan dalam suatu objek atau konsep. Peserta didik mungkin juga mengalami kesulitan saat mereka mulai

mencampur strategi untuk melakukan ringkasan komparatif. Misalnya, seorang peserta didik mungkin uraikan persamaan dan perbedaan satu item terlebih dahulu, lalu semua yang kedua; mahapeserta didik dapat memutuskan untuk membandingkan bagian dari satu item, lalu bagian lain; atau dia mungkin memilih untuk mencampur perbandingan dan perbedaan. Bagaimanapun, beberapa peserta didik mungkin mengalami kegagalan karena organisasi yang salah Bidang masalah lain mungkin membentuk pernyataan dengan kata-kata mereka sendiri untuk mengembangkan pemahaman dan mengkonsolidasikan informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Untuk menjadi ahli dalam keterampilan membandingkan dan membedakan, seseorang harus menentukan tujuan dengan tujuan untuk membandingkan dan menentukan berapa banyak item atau peristiwa yang harus dibandingkan dan terekam, dan mengidentifikasi atribut penting untuk diamati.
- 2) Tingkat perbandingan dan kontras ini bergantung pada jumlah informasi yang diketahui peserta didik tentang objek atau konsep yang sedang dipertimbangkan. Orang yang pandai membuat perbandingan dan kontras juga bisa memilih atribut yang sesuai yang akan memandu penyelidikan. Juga, mereka yang pandai dalam perbandingan dan kontras akan dapat mengatur data yang dikumpulkan, yang memungkinkan peserta didik membandingkan dan

membedakan secara efisien atribut yang sedang dipertimbangkan. Beberapa peserta didik akan lebih suka merancang grafik pencatatan atau grafik untuk mengatur informasi atau data ini.

4. Mengklasifikasikan (*Classifying*)

Kegiatan dirancang untuk membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dari semua jenjang dalam mengklasifikasi. klasifikasi adalah didefinisikan sebagai proses pemilahan data kedalam kelompok berdasarkan karakteristik atau atribut yang relevan. Kelompok atau kategori untuk klasifikasi dibuat oleh pemikir sesuai untuk tujuan tugas. Mengelompokkan berarti mengelompokkan benda, orang, atau gagasan sesuai dengan aturan yang diciptakan pemikir. Klasifikasi dapat digunakan di bidang akademik atau bidang karir dan tidak terbatas pada sains. Orang yang menggunakan keterampilan ini sering mencoba membawa data yang tidak terorganisir, memahami sejumlah besar data, atau membangun struktur. Berikut ini contoh dalam keterampilan klasifikasi:

- a. Pemilik rumah yang perlu mengatur garasi, dapur, atau kamar mandi mereka.
- b. Penulis yang mengklasifikasikan kejadian dan gagasan untuk cerita mereka.
- c. Anak-anak yang mengklasifikasikan mainan untuk menemukannya lebih mudah di rak mainan mereka.
- d. Periset yang mengatur tanggapan survei ke dalam kelompok untuk lebih memahami respon yang berbeda
- e. Pemilik toko yang harus mengatur produk di toko mereka.

Bagi peserta didik untuk menggunakan keterampilan mengklasifikasikan, mereka harus dapat melakukan hal berikut:

- a. Kenali benda, orang, atau ide di dalam kumpulan data
- b. Memutuskan tujuan untuk mengklasifikasikan data atau benda
- c. Amati kumpulan data
- d. Temukan atribut yang paling relevan untuk klasifikasi
- e. Urutkan barang sesuai atribut ini
- f. Menyusun kembali atau membuat himpunan bagian jika perlu, dan
- g. Bersikap positif terhadap penggunaan keterampilan ini.

Jika peserta didik mengalami kesulitan dengan salah satu atau semua ini prasyarat, mereka mungkin pemula dengan keterampilan ini dan kemungkinan mereka membutuhkan instruksi eksplisit dari guru untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengklasifikasikan. Sudah menjadi pengalaman kami bahwa banyak peserta didik mengalami kesulitan dengan keterampilan ini, bukan karena mereka tidak bisa mengurutkan objek atau gagasan yang sedang dipertimbangkan, tapi karena mereka sering memilikinya kesulitan menentukan fitur kunci mana yang harus dipertimbangkan dalam membentuk kelompok. Meskipun kebanyakan peserta didik tidak memiliki kesulitan untuk mengkategorikan objek saat orang lain menciptakan atau memberi nama kelompok, peserta didik yang sama sering merasa tidak nyaman dan tidak nyaman saat diminta untuk memutuskan yang dan berapa banyak kelompok

yang harus digunakan untuk mengklasifikasikan kumpulan data baru.

Di lain waktu, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dengan keterampilan ini karena mereka tidak mempertimbangkan atribut terpenting dari objek yang harus digunakan untuk klasifikasi. Pemikiran ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau pandangan singkat. Misalnya, jika pemilik rumah mengatur alat di garasinya, mengklasifikasikan alat menurut warna atau ukuran bisa menjadi cara mudah untuk menyelesaikannya. Namun, pemilik rumah mungkin akan merasa lebih berguna untuk mengklasifikasikan mereka berdasarkan fungsi atau pada musim tahun di mana mereka biasanya digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Untuk menjadi pengklasifikasi yang baik, seseorang harus memutuskan apa tujuannya untuk mengklasifikasikan aktivitas dan atribut mana yang harus digunakan untuk mengatur kelompok. Menjaga pikiran terbuka selama aktivitas klasifikasi memungkinkan kita menemukan data tambahan dan berharga yang tidak diperhatikan selama tahap awal pengaturan atribut dan data daftar dapat digunakan untuk membentuk kelompok baru di tengah proses.
- 2) Klasifikasi yang baik juga tergantung pada beberapa pengetahuan sebelumnya dengan area konten yang menjadi fokus klasifikasi. Jika kita memiliki sedikit informasi tentang tekstil, misalnya, akan sulit bagi kita untuk dapat mengidentifikasi atribut umum yang akan mengarahkan atribut kegiatan klasifikasi kita seperti

jenis kain, tenunan, tekstur, dan warna. Begitu kita dapat mengidentifikasi atribut ini, mereka dapat digunakan untuk mengarahkan klasifikasi kita dan meningkatkan kualitas keputusan pengelompokan kita.

3) Ketiga, orang yang pengklasifikasi yang baik akan menggunakan tujuan dan atribut untuk memandu prosedur pemilahan data. Setelah kelompok dibentuk, setiap item dalam kumpulan data harus diperiksa untuk karakteristik dan atribut untuk menempatkan objek pada kelompok yang sesuai.

5. Melakukan pengamatan (*Making Observations*)

Kegiatan ini dirancang untuk membantu peserta didik meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan pengamatan. Untuk tujuan unit ini, observasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk secara sengaja memeriksa atribut objek atau kejadian untuk mencatat rincian melalui penggunaan salah satu atau semua indra atau sarana mekanis yang sesuai. Pengamatan ini dapat menghasilkan data kualitatif atau kuantitatif. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dari pengamatan ini dapat diatur dengan kata dan frasa. Meskipun kita biasanya memikirkan sebuah pengamatan sebagai tindakan yang dilakukan dengan mata kita, keterampilan tersebut dapat melibatkan setiap atau semua indra kita dan sumber informasi primer dan sekunder. Selain itu, pengamatan dapat dibantu dengan penggunaan alat mekanis atau teknis seperti teleskop, mikroskop, anemometer, banyak pengamatan dilakukan dari waktu ke waktu. Pengamatan dapat digunakan di bidang akademik atau bidang karir dan

tidak terbatas pada sains atau seni. Tujuan untuk membuat pengamatan bisa sama bervariasi. Biasanya, pengamat mencoba untuk:

- a. Mengumpulkan informasi
- b. Menganalisis informasi
- c. Catatan rincian
- d. Mengidentifikasi unsur-unsur yang hilang
- e. Cari masalah, atau
- f. Mengerti apa yang mungkin menyebabkan sesuatu terjadi.

Keterampilan ini biasanya digunakan bersamaan dengan kemampuan berpikir lainnya untuk membuat kesimpulan, keputusan, atau untuk memecahkan suatu masalah. Contoh keterampilan ini meliputi:

- a. Tukang kebun yang mengamati tanaman sebelum mereka memotong, memangkas, atau menyuburkan
- b. orang tua yang merawat anak yang sakit sebelum memberi obat pada anaknya
- c. Bisnis yang mengambil survei untuk mengamati karakteristik klien yang membeli produknya
- d. Guru yang mengamati peserta didik untuk mengidentifikasi penyebab kenakalan, dan
- e. Wasit yang mengamati permainan atletik untuk menemukan pelanggaran peraturan.

Bagi peserta didik untuk menggunakan keterampilan melakukan pengamatan, mereka harus dapat melakukan hal berikut:

- 1) Kenali konten yang menjadi fokus pengamatan
- 2) Dapat mengidentifikasi tujuan pengamatan
- 3) Mengidentifikasi atribut yang terkait dengan tujuan ini

- 4) Menggambarkan karakteristik yang terkait dengan tujuan ini, dan
 - 5) Bersikap positif terhadap penggunaan keterampilan ini
6. Perencanaan (*Planning*)

Kegiatan ini telah dirancang untuk membantu peserta didik dari semua tingkat kemampuan meningkatkan kemampuan mereka dalam perencanaan. Untuk keperluan unit ini, perencanaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Perencanaan adalah Prosedur yang digunakan oleh pemikir terampil untuk mengidentifikasi semua elemen secara efektif rencana. Rencana yang baik menyatakan apa yang perlu dilakukan, mencantumkan sumber daya, kiriman, dan barang lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana, mencantumkan tugas atau tugas yang akan diambil untuk mencapai rencana itu, dan meramalkan adanya masalah yang mungkin mencegah agar rencana tidak dilaksanakan. Perencana yang efektif juga mencakup langkah tindak lanjut yang mengevaluasi keefektifan rencana dan membuat daftar saran atau revisi untuk perbaikan setelah rencana tersebut dilaksanakan sehingga dapat digunakan. berhasil di masa depan dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin mengganggu pelaksanaan atau pelaksanaan rencananya.

Setelah peserta didik mengidentifikasi tujuan mereka, mereka akan mengidentifikasi materi, peralatan, orang, atau data yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut dan kemudian akan mengatur serangkaian kejadian atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketika mereka mulai mempertimbangkan langkah-langkah ini, guru harus mendorong peserta didik memikirkan sumber lain yang mungkin mereka butuhkan dan menambahkannya ke daftar sumber dayanya. Peserta didik juga harus mencoba mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghalangi rencana untuk diselesaikan dan kesalahan yang mungkin dilakukan. Guru dapat meminta peserta didik membuat prediksi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya dan menggunakannya untuk memperbaiki rencana sebelum diimplementasikan.

Saat peserta didik mulai menerapkan rencana tersebut, guru harus meminta peserta didik untuk mengikuti langkah-langkahnya dengan hati-hati dan melakukan penyesuaian yang akan memperbaiki rencana atau mencapai tujuan. Meskipun rencana ini tampaknya berurutan, perencana sering kembali ke langkah awal selama proses menambahkan detail lebih banyak. Perencana yang efektif akan dapat melakukannya dengan belajar bagaimana memantau dan menilai tugas yang sedang dilakukan. Ketika mereka melaksanakan rencana tersebut, perencana akan menilai sejauh mana rencana tersebut berjalan dan dapat merevisi rencana tersebut atau bahkan melakukan langkah-langkah yang tidak direncanakan karena mereka menilai dan memantau keefektifannya. Mereka yang mempelajari proses perencanaan untuk pertama kalinya mungkin mengalami kesulitan dengan dua pemikiran ini. Mendorong atau melatih dari guru akan membantu pemikir pemula saat mereka belajar menggunakan keterampilan secara lebih efisien. Setelah tugas selesai, peserta didik diminta untuk

menilai kualitas rencana yang mereka buat, menilai bagaimana rencana tersebut mencapai tujuan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Keterampilan berpikir perencanaan dapat digunakan di bidang akademik atau bidang karir. Beberapa tujuan dapat mencakup hal berikut:

- 1) Untuk sampai pada solusi pada suatu masalah
- 2) Mengembangkan strategi untuk mencapai suatu tujuan
- 3) Mengajar orang lain bagaimana menyelesaikan sebuah tugas
- 4) Merencanakan sebuah kejadian masa depan
- 5) Untuk memperbaiki situasi.

Keterampilan ini biasanya digunakan bersamaan dengan kemampuan berpikir lainnya untuk membuat rencana menyelesaikan tugas tertentu. Contoh keterampilan ini meliputi:

- a. Peserta didik yang merencanakan proyek kelas atau tugas;
- b. Keluarga yang sedang merencanakan liburan;
- c. Pemilik toko yang berencana untuk mengatur penjualan di toko;
- d. Guru yang sedang menulis rencana pelajaran untuk digunakan di kelas mereka; dan
- e. Penulis yang sedang menulis cerita.

Bagi peserta didik untuk menggunakan keterampilan perencanaan, mereka harus dapat melakukan tugas ini:

- 1) Mengenali tujuan yang harus dicapai
- 2) Mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan

- 3) Meramalkan keadaan yang dapat mencegah pelaksanaan rencana
- 4) Memantau dan menilai pelaksanaan rencana
- 5) Modifikasi rencana atau strategi berdasarkan potensi rintangan yang terjadi atau kesalahan itu mungkin dibuat
- 6) Mengidentifikasi sumber daya yang akan membantu mereka mencapai tujuan mereka dan melaksanakan rencana langkah-langkahnya
- 7) Mengevaluasi kualitas rencana; dan
- 8) Tentukan sejauh mana tujuan tercapai.

Jika peserta didik mengalami kesulitan dengan salah satu atau semua prasyarat ini, kemungkinan besar akan terjadi. Perlu instruksi eksplisit dari guru untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam merencanakan. Peserta didik mungkin mengalami kesulitan dengan keterampilan ini, bukan karena mereka tidak bisa merancang sebuah rencana, tapi karena mereka memiliki tidak pandai memikirkan pemikiran mereka sendiri. Guru dapat membantu peserta didik menjadi lebih baik dalam pemikiran mereka sendiri dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan "berpikir keras". yang baru saja mereka selesaikan. Guru dapat membantu peserta didik memikirkan rencana yang mereka laksanakan dengan melakukan intervensi selama kinerja aktual tugas dan meminta peserta didik untuk menilai hasil yang mereka dapatkan. Cara lain untuk memfasilitasi proses ini adalah dengan meminta peserta didik melatih guru saat mereka memodelkan keseluruhan proses.

Di lain waktu, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dengan keterampilan ini karena mereka telah salah mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan atau tujuannya untuk dicapai, dan telah gagal untuk membagi masalah atau tujuan yang kompleks menjadi beberapa sub-tujuan. dalam mengidentifikasi kapan suatu aktivitas memiliki banyak masalah atau sasaran yang perlu dicapai dan dalam memahami bahwa pernyataan masalah/sasaran yang berbeda akan menghasilkan rencana yang berbeda.

Masalah umum lainnya dengan penggunaan keterampilan ini adalah memprediksi kemungkinan masalah potensial ini sering bergantung pada pengalaman sebelumnya dengan tugas serupa. Peserta didik yang menolak untuk mengandalkan informasi ini harus didorong untuk berbicara dengan orang lain dan mengumpulkan informasi yang akan meningkatkan pengetahuan perencana tentang topik yang sedang dibahas.

Peserta didik juga akan mengalami kesulitan dalam menilai pelaksanaan rencana mereka. Mereka harus diminta untuk mengamati dan mengevaluasi keefektifan setiap langkah dari rencana tersebut sebagaimana yang diimplementasikan. Guru dapat membantu peserta didik dengan meminta mereka berhenti mengikuti setiap langkah rencana dan menandai langkah-langkah yang berhasil dilakukan. Selain itu, peserta didik harus didorong untuk secara berkala memeriksa kewajaran hasil yang telah mereka capai. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Untuk menjadi perencana yang efektif, orang harus menyadari bahwa sebuah rencana perlu dibuat. Tahap pengenalan masalah ini mengharuskan peserta didik membuat pernyataan singkat tentang masalah atau sasaran yang akan memandu pengembangan sebuah rencana. Penting agar peserta didik mengenali mungkin ada beberapa masalah atau tujuan yang ingin dicapai. Rencana kompleks ini harus dipecah menjadi beberapa sub-tujuan/sub-masalah untuk membuat perencanaan dapat dikelola. Awalnya, guru mungkin ingin mengidentifikasi pernyataan tujuan yang akan dicapai agar peserta didik dapat fokus pada pengembangan rencana.
- 2) Mengembangkan rencana atau strategi juga memerlukan beberapa pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dengan area konten yang menjadi fokus rencananya. Ketika sedikit informasi diketahui tentang masalah atau sasaran yang sedang diselidiki, peserta didik mungkin salah mengenali masalahnya atau gagal merencanakannya dengan tepat. Oleh karena itu, pemahaman tentang topik yang mendasari masalah akan membantu peserta didik untuk memilih strategi mereka atau merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan menghilangkan hambatan atau kesalahan yang telah dialami sebelumnya.
- 3) Perencana yang baik juga menyadari bahwa kejadian acak dapat terjadi sementara langkah-langkahnya dilakukan diimplementasikan, dan mereka harus menilai dan memantau hasilnya pada setiap langkah sebelum melangkah maju dengan langkah-langkah

lainnya. Oleh karena itu, peserta didik harus dipersiapkan dan didorong untuk menyesuaikan langkah-langkahnya dengan membangun ketentuan ini ke dalam rencana mereka. Perencana harus menyadari bahwa pelaksanaan rencana dapat terganggu, dan mereka akan diminta untuk mencari informasi atau data tambahan sebelum melanjutkan. Gangguan ini mungkin juga mengharuskan perencana untuk mengumpulkan bahan tambahan, peralatan, atau sumber daya manusia sebelum mereka dapat menerapkan rencana mereka secara efektif. Peserta didik harus didorong untuk mendokumentasikan informasi ini dan menyesuaikan rencana yang sesuai.

7. Memprediksi (*Predicting*)

Kegiatan dirancang untuk membantu peserta didik dari semua tingkat kemampuan meningkatkan kemampuan mereka dalam memprediksi. Untuk keperluan unit ini, prediksi didefinisikan sebagai kemampuan untuk meramalkan kejadian masa depan dengan memuaskan. Mampu membuat prediksi membantu kita mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di masa depan dan lebih mempersiapkan diri untuk yang akan datang acara. Memprediksi mengharuskan kita untuk menyatakan terlebih dahulu apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya berdasarkan pola, tren, atau pengulangan yang telah kami identifikasi. Baik Prediksi mengharuskan pemikir untuk secara jelas menentukan apa itu prediksi adalah tentang, mengidentifikasi atribut yang relevan dengan prediksi dan mengumpulkan data yang sesuai, amati sebanyak mungkin set data mungkin, bandingkan dan kontras atribut atau

data untuk memutuskan apa yang tetap sama dan perubahan apa, tentukan bagaimana konsisten perubahan ini antara kumpulan data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau pengulangan, amati arah perubahan, dan membuat prediksi hasil yang paling mungkin terjadi.

Prediksi berbeda dari tebakan karena dugaan berbasis menyebabkan prediksi yang tidak tepat jika gagal dibuktikan oleh tidak dibandingkan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, kemungkinan terjadi sesuatu pada Masa depan harus didasarkan pada tren, pola, atau pengulangan yang ditemukan dalam data selama periode tertentu waktu untuk mencegah prediksi menjadi tebakan.

Sebelum peserta didik memulai sebuah tugas, mereka harus didorong untuk mengembangkan sebuah rencana atau strategi bawa keluar Pemikiran antisipatif ini biasanya melibatkan tiga tugas pendahuluan: pendefinisian prediksi, menentukan data apa yang perlu dikumpulkan, dan merancang cara untuk memetakan atau atur data Pengorganisasian lanjutan akan membantu peserta didik ketika tiba saatnya untuk mengumpulkan data yang relevan dengan prediksi, identifikasi pola, tema, pengulangan, atau kecenderungan dalam data, dan Tentukan kemungkinan setiap hasil yang dibayangkan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, gagal perencanaannya akan mengirim peserta didik ke arah yang salah dalam pemikiran mereka, yang pada gilirannya mungkin terjadi menyebabkan peserta didik mengumpulkan data yang tidak sesuai dengan prediksi dan akhirnya mengarah peserta didik menyatakan suatu prediksi, hasil, atau kesimpulan yang salah atau tidak akurat.

Setelah peserta didik mengidentifikasi tujuan prediksi, mereka akan menentukan atribut untuk memandu pengamatan dan pengumpulan data mereka. Selanjutnya, peserta didik perlu menentukan data mana yang akan direkam dan mengembangkan strategi untuk mencatat temuan mereka. Jika data yang mereka kumpulkan didasarkan pada pengamatan, peserta didik harus memutuskan apakah mereka akan merekam kejadian secara kuantitatif (menggunakan angka) atau secara kualitatif (menggunakan kata-kata) atau keduanya. Ini akan menjadi penting bagi peserta didik untuk menentukan juga kapan mereka akan mengumpulkan datanya. Akankah mereka melakukan pengamatan selama periode 5 menit setelah istirahat selama satu minggu, selama periode makan siang selama beberapa hari, atau dengan mengumpulkan data yang diketahui dari beberapa tahun untuk mengidentifikasi sebuah tren? Perencanaan pendahuluan ini membantu peserta didik untuk mengatur prediksi mereka, untuk mempersempit tujuan prediksi menjadi pengalaman yang mudah dikelola, dan mengumpulkan data akurat dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kemungkinan kecenderungan. Ketika mereka mulai mempertimbangkan langkah-langkah ini, guru harus mendorong peserta didik menyusun strategi untuk mengatur kumpulan data. Selain itu, peserta didik mungkin memerlukan peralatan tambahan untuk memudahkan pengumpulan data. Perekam tape dapat digunakan untuk melengkapi catatan mereka, sementara peserta didik lain mungkin merasa terbantu untuk mencatat pengamatan mereka pada grafik atau grafik.

Beberapa pengamatan mungkin memerlukan penggunaan pita pengaman, *stop watches*, kaca pembesar, teleskop, cawan petri, dan mikroskop untuk mendapatkan kumpulan data yang akan digunakan untuk membuat prediksi.

Saat peserta didik menyelesaikan pengumpulan data yang relevan, guru harus meminta peserta didik untuk mengembangkan strategi mengatur temuan mereka. Peserta didik dapat memetakan temuan mereka, gunakan grafik, atau identifikasi kategori data yang nampak pergi bersama-sama. Pada tahap ini di prediksi, mahapeserta didik akan diminta untuk membandingkan dan membandingkan data untuk mengidentifikasi pola, tren, tema, atau pengulangan antara kumpulan data. Berdasarkan konsistensi dalam pola, arah pola, frekuensi pola yang terjadi, dan repetitifitas kategori, peserta didik akan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Peserta didik juga harus didorong untuk mempertimbangkan situasi dan pengalaman serupa yang mereka ingat dari masa lalu untuk menghasilkan hasil yang mungkin. Kemudian, peserta didik harus mengakhiri prediksi dengan menganalisa kemungkinan prediksi itu terjadi di masa depan.

Kemampuan berpikir prediksi dapat digunakan di bidang akademik atau bidang karir. Tujuan untuk membuat prediksi bisa sama bervariasi. Biasanya, peramal yang efektif menggunakan keterampilan ini untuk melakukan tugas ini:

- a. Untuk menentukan apakah solusi terhadap suatu masalah akan terus berjalan efektif di masa depan

- b. Untuk mengantisipasi acara yang akan datang
- c. Mengubah perilaku
- d. Memperbaiki situasi
- e. Untuk memutuskan tindakan di masa depan, dan
- f. Untuk merencanakan perbaikan acara.

Bagi peserta didik untuk menggunakan kemampuan memprediksi, mereka harus dapat melakukan hal berikut:

- a. Menentukan tujuan prediksi
- b. Pilih atribut yang akan memandu pengumpulan data
- c. Mengembangkan strategi untuk mengumpulkan dan mencatat data
- d. Merancang cara untuk mengatur pengumpulan data
- e. Bandingkan dan kontras atribut atau temuan untuk mengidentifikasi pola, tren, tema, atau pengulangan antar kumpulan data
- f. Mengidentifikasi konsistensi dalam persamaan, arah pola, atau
- g. Pengulangan kategori untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya; dan
- h. Nyatakan hasil yang paling mungkin terjadi.

Jika peserta didik mengalami kesulitan dengan salah satu atau semua prasyarat ini, kemungkinan mereka akan membutuhkannya Instruksi eksplisit dari guru untuk meningkatkan kemampuan mereka membuat prediksi. Telah Pengalaman kami bahwa banyak peserta didik mengalami kesulitan dengan keterampilan ini, bukan karena mereka tidak bisa buatlah sebuah prediksi, tapi karena mereka belum mahir menyusun strategi mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data yang berkaitan dengan prediksi yang akan dibuat. Guru dapat

membantu peserta didik menjadi lebih baik dalam menggunakan keterampilan ini dengan melibatkan peserta didik dalam "berpikir keras" kegiatan tentang tugas di mana mereka terlibat atau akan dilibatkan, atau aktivitas yang baru saja mereka selesaikan. Guru dapat membantu peserta didik memikirkan prediksi mereka mencoba membuat dengan melakukan intervensi selama kinerja aktual dari tugas dan permintaan peserta didik untuk menilai hasil yang mereka dapatkan. cara lain untuk memudahkan proses ini adalah dengan mintalah peserta didik untuk melatih guru karena dia memodelkan keseluruhan proses. Peserta didik bisa mendesain pertanyaan untuk membantu guru memikirkan apa yang dia lakukan saat proses terungkap.

Di lain waktu, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dengan keterampilan ini karena mereka telah salah mengidentifikasi tujuan pembuatan prediksi, belum mengikuti cara sistematis untuk mengumpulkan data, telah mengumpulkan data yang salah, atau telah menganalisis data secara tidak benar. Bila ini terjadi, peserta didik mungkin perlu pelajaran terpisah yang fokus pada langkah tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan membuat prediksi yang cenderung terjadi. Oleh karena itu, Guru perlu menilai dan memantau pelaksanaannya keterampilan untuk mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang perlu ditunjukkan atau dimodelkan dalam situasi kelompok besar, untuk kelompok peserta didik yang ada mengalami kesulitan yang sama, atau untuk peserta didik individual.

Masalah umum lainnya dengan penggunaan keterampilan ini adalah peserta didik mungkin kurang dalam pengalaman mengorganisir data mereka. Guru akan perlu mencurahkan waktu dalam membantu peserta didik belajar bagaimana mengatur data dalam kategori, grafik, grafik batang, histogram, grafik garis, dan diagram lingkaran. Kemampuan untuk mengatur data acak mereka berbeda dengan kemampuan membaca data orang lain pada grafik atau grafik. Guru tidak boleh berasumsi bahwa karena peserta didik dapat membaca grafik yang ditampilkan dalam buku matematika mereka, bahwa peserta didik akan tahu bagaimana caranya mengatur data mereka sendiri. Ini adalah dua keterampilan yang berbeda.

Beberapa peserta didik juga akan mengalami kesulitan dalam menganalisis data mereka sendiri. Langkah ini membutuhkan peserta didik untuk mengamati, berhipotesis, menyimpulkan, mendeteksi bias, dan mencatat persamaan dan perbedaan di kumpulan data. Jika seorang peserta didik mengalami kesulitan dengan keterampilan prasyarat ini, maka Hasil prediksi mereka mungkin kurang sempurna. Guru harus siap membantu peserta didik "Berpikir keras" sementara mereka menganalisis data. Selain itu, seorang guru bisa menentukan dimana peserta didik mengalami kesulitan dengan meminta peserta didik untuk membenarkan bagaimana mereka tiba prediksi mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan strategi sebagai berikut:

Untuk menjadi peramal yang efektif, seseorang harus menentukan tujuan pembuatan prediksi. Tujuan ini akan membantu peserta didik memilih atribut yang tepat untuk

mengamati dan mengidentifikasi data atau informasi yang akan dikumpulkan. Ini juga membimbing peserta didik untuk mempertimbangkan tidak hanya data apa yang akan dikumpulkan, tapi bagaimana dan kapan data dikumpulkan. Pemikiran antisipatif ini meningkatkan kemungkinan prediksi menjadi akurat dan penjaga melawan kemungkinan prediksi menjadi tebakan acak atau bias. Kemampuan untuk membuat prediksi juga bergantung pada beberapa pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dengan area konten yang menjadi fokus prediksi. Ketika sedikit informasi yang diketahui tentang jenis prediksi yang sedang diselidiki, peserta didik dapat mengumpulkan data yang tidak akurat

8. Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)

Problem solving adalah metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar (Gulo, 2002: 111). Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana peserta didik mengerjakan permasalahan yang outentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri (Arends, 2008: 45). Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik untuk melakukan pemecahan masalah- masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian di analisis dan dicari solusi dari permasalahan yang ada. Solusi dari permasalahan tersebut tidak mutlakk mempunyai satu jawaban yang benar artinya peserta didik dituntut pula untuk belajar secara kritis. Peserta didik diharapkan menjadi individu yang berwawasan luas serta mampu

melihat hubungan pembelajaran dengan aspek-aspek yang ada di lingkungannya. Dalam pembelajaran, *problem solving* bertujuan agar peserta didik mampu memberikan makna terhadap pengalaman yang telah dilakukan yang akan bermuara pada struktur kognitifnya. Manfaat penggunaan metode *problem solving pada proses pembelajaran*. Penggunaan metode *problem solving* memberikan beberapa manfaat antara lain :

- a. Mengembangkan sikap keterampilan peserta didik dalam memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri
- b. Mengembangkan kemampuan berpikir para peserta didik, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah
- c. Melalui inkuiri atau *problem solving* kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar - benar dihayati, diminati peserta didik serta dalam berbagai macam ragam alternatif
- d. Membina pengembangan sikap perasaan (ingin tahu lebih jauh) dan cara berpikir objektif -mandiri, krisis - analisis baik secara individual maupun kelompok

Dalam pelaksanaan *problem solving* dapat dilakukan melalui kelompok dengan prosedur penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

1. Mengifinisikan Masalah
Mendefinisikan masalah di kelas dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Kemukakan kepada peserta didik peristiwa yang bermasalah, baik melalui bahan tertulis maupun secara lisan, kemudian minta pada peserta didik

untuk merumuskan masalahnya dalam satu kalimat sederhana (*brain storming*). Tampunglah setiap pendapat mereka dengan menuliskannya dipapan tulis tanpa mempersoalkan tepat atau tidaknya, benar atau salah pendapat tersebut.

- b) Setiap pendapat yang ditinjau dengan permintaan penjelasan dari peserta didik yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dicoret beberapa rumusan yang kurang relevan. Dipilih rumusan yang tepat, atau dirumuskan kembali (*rephrase, restate*) perumusan – perumusan yang kurang tepat. akhirnya di kelas memilih satu rumusan yang paling tepat dipakai oleh semua.

2. Mendiagnosis masalah

Setelah berhasil merumuskan masalah langkah berikutnya ialah membentuk kelompok kecil, kelompok ini yang akan mendiskusikan sebab – sebab timbulnya masalah

3. Merumuskan Alternatif Strategi

Pada tahap ini kelompok mencari dan menemukan berbagai alternatif tentang cara penyelesaian masalah. Untuk itu kelompok harus kreatif, berpikir divergen, memahami pertentangan diantara berbagai ide, dan memiliki daya temu yang tinggi

4. Menentukan dan menerapkan Strategi

Setelah berbagai alternatif ditemukan kelompok, maka dipilih alternatif mana yang akan dipakai. Dalam tahap ini kelompok menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cukup cukup kritis, selektif, dengan berpikir konvergen

5. Mengevaluasi Keberhasilan Strategi

Dalam langkah terakhir ini kelompok mempelajari keberhasilan strategi pembelajaran dan dampak dari penerapan strategi tersebut

(W.Gulo 2002 : 117).

C. *Affective Teaching* dalam Pembelajaran PKn SD

Pembentukan dan pengembangan sikap serta moral seorang peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah menjadi sangat penting. Sebab dasar pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila merupakan kebutuhan bagi bangsa indonesia dan juga kebutuhan akademis melalui ilmu pengetahuan. Namun demikian, kondisi kurikulum yang sangat padat, serta kendala-kendala lain menuntut proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan secara baik, sistematis agar mencapai tujuan yang direncanakan, dan dapat menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Affectif sering kali disebut dengan kata sikap, nilai-nilai dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Krathwohl dan kawan-kawan (1964), dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives: Affective Domain*, yang dikutip oleh Roestiyah N.K, domain afektif memiliki tingkat yaitu: penerimaan, respons, menghargai, mengatur diri (mengorganisasi), dan karakterisasi nilai.

Penerimaan, adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan atau suatu

masalah. seseorang memilih perhatian yang positif terhadap gejala-gejala tertentu manakala mereka memiliki kesadaran tentang gejala, kondisi atau objek yang ada. Merespons atau menanggapi ditujukan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk membantu orang lain, kemauan untuk mengikuti perintah, dan lain sebagainya

Menghargai, tujuan ini berkenaan dengan kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. menghargai terdiri dari penerimaan suatu nilai dengan keyakinan tertentu, seperti menerima akan adanya kebebasan atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan; mengutamakan suatu nilai seperti memiliki keyakinan akan kebenaran suatu ajaran tertentu; serta komitmen akan kebenaran yang diyakininya dengan aktivitas

Mengatur diri (mengorganisasi), yaitu tujuan yang berhubungan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antarnilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Tujuan ini terdiri dari mengkonseptualisasi nilai, yaitu memahami unsur-unsur abstrak dari suatu nilai yang telah dimiliki dengan nilai-nilai yang datang kemudian: serta mengorganisasi suatu sistem nilai, yaitu mengembangkan suatu sistem nilai yang saling berhubungan yang konsisten dan bulat termasuk nilai-nilai yang lepas-lepas.

Karakterisasi nilai, yakni tujuan yang berkenaan dengan mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan (falsafah) hidup, serta

dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku (Roestiyah, 2008: 130).

Sejalan dengan penjelasan di atas istilah cipta, rasa, dan karsa yang dicetuskan oleh tokoh pendidikan yakni Ki Hajar Dewantara (Mu'in, 2011: 84) mengandung konsep yang mengakomodasi berbagai potensi anak didik. Baik menyangkut aspek cipta yang berhubungan dengan otak dan kecerdasan, aspek rasa yang berkaitan dengan emosi dan perasaan, serta karsa atau keinginan maupun ketrampilan yang lebih bersifat fisik.

Terbentuknya sebuah sikap pada diri seseorang tidaklah secara tiba-tiba, tapi lewat proses yang terkadang cukup lama. Proses ini biasanya dilakukan lewat pembiasaan dan juga modelling (percontohan). Pembentukan sikap peserta didik melalui pembiasaan memang sulit dan tidak mudah, sehingga pendidik harus mampu dan perlu dibiasakan supaya anak didik yang diajar mempunyai sifat sikap sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Skinner pembentukan sikap itu menekankan pada proses peneguhan respons anak. Misalnya, peserta didik yang berprestasi pendidik sebaiknya memberikan penguatan (*reinforcement*) dengan cara memberikan hadiah atau perilaku yang menyenangkan, sehingga lama-kelamaan peserta didik akan selalu berusaha meningkatkan sikap positifnya dan kemampuannya.

Pembelajaran sikap seseorang dapat juga dilakukan melalui proses modelling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontoh. Permulaan biasanya dimulai dari perasaan kagum. Misalnya, kekaguman terhadap kepintaran orang lain atau kagum terhadap kemampuan yang dimiliki oleh teman satu kelasnya. Maka secara perlahan

perasaan kagum akan mempengaruhi emosinya dan secara perlahan itu pula anak meniru perilaku atau kemampuan yang dimiliki oleh idolanya tersebut.

Proses penanaman sikap kepada peserta didik terhadap suatu objek melalui proses *modelling* pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun pendidik perlu memberikan pemahaman mengapa hal itu dilakukan. Misalnya, pendidik perlu menjelaskan mengapa kita harus telaten terhadap tanaman, atau mengapa kita harus berpakaian dengan rapi, dan sebagainya. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai. Adapun penanaman sikap kepada peserta didik dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. Pola pembiasaan

Menurut Watson, cara belajar sikap yang disebabkan dengan kebiasaan dapat menjadi dasar penanaman sikap tertentu terhadap suatu objek. Dalam proses pembelajaran di sekolah, baik secara disadari maupun tidak, guru dapat menanamkan sikap tertentu kepada peserta didik melalui proses pembiasaan misalnya, peserta didik yang setiap kali menerima perlakuan yang tidak mengenakan dari guru seperti mengejek atau menyinggung perasaan anak, maka lama-kelamaan akan timbul perasaan kesal dari anak tersebut yang pada akhirnya dia tidak menyukai guru dan mata pelajarannya.

Belajar membentuk sikap melalui pembiasaan juga dilakukan oleh Skinner melalui teorinya "*operant conditioning*" proses pembentukan sikap melalui pembiasaan yang dilakukan Watson berbeda dengan

proses pembiasaan sikap yang dilakukan Skinner. Skinner menekankan pada proses peneguhan respons anak, dimana setiap kali anak menunjukkan prestasi yang baik diberikan penguatan dengan cara memberikan hadiah atau perilaku yang menyenangkan. Dari Watson dan Skinner, menurut kelompok kami dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembentukan sikap dengan pola pembiasaan bukan hanya melalui proses pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus melainkan juga memberikan penguatan sehingga anak akan berusaha dan bersemangat untuk meningkatkan sikap positifnya.

2. Modeling

Pembelajaran sikap seseorang yang dilakukan melalui proses modeling yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontoh. Proses modeling ini adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya yang dimulai rasa kagum. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginannya untuk melakukan peniruan (*imitasi*). Hal yang ditiru itu adalah perilaku-perilaku yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh orang yang menjadi idolanya. Prinsip peniruan ini yang dimaksud dengan modeling.

Proses penanaman sikap anak terhadap suatu objek melalui proses modeling pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun anak perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan. Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita harus berpakaian bersih atau mengapa kita harus telaten menjaga dan memelihara tanaman.

BIODATA PENULIS



Machful Indra Kurniawan, M.Pd. lulus S1 di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya tahun 2009, lulus S2 di Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya tahun 2012. Saat ini adalah dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mengampu mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, konsep dasar PKn SD, dan Pengembangan Pembelajaran PKn

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab, & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, Zainul Ittihad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arnyana, I. B. P. 2004. Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah di Pandu Strategi Kooperatif serta Pengaruh Implementasinya terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Peserta didik SMA pada Pelajaran Ekosistem. Disertasi. PPs Universitas Mulawarman
- Arend, Richard I. 2004. *Learning to Teach*. New York: Mc Graw Hill Companies
- BSNP. (2006). *Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksa Press
- Cholisin. (2000). *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan-Pendidikan Kewarganegaraan*. UNY: Yogyakarta.
- Depdiknas. 2003. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Ennis. R.H. 1985. Goals for A Critical Thinking I Curriculum. Developing Minds A Resource Book for Teaching Thinking. Virginia: Association for Suopervisions and Curriculum Development (ASCD) pp. 54-57.

- Galbreath J.1999. “ Preparing the 21th Century Worker: The Link Between Computer Based Technology and Future Skills Sets” Educational Technology. Desember 1999 pp. 14-22
- Johnson. E.B. (2000). Contextual Teaching and Learning . California: Corwin Press, Inc.
- Joyce, B and Marsha Weild. 2009. *Models of Teaching: Model-model Pengajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Kemendikbud . (2012). *Bahan Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013*. Kemendikbud
- Liliasari. 2001. “Model Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Calon Guru sebagai Kecenderungan Baru pada Era Globalisasi. Jurnal Pengajaran MIPA 2 (1). Juni 2001. hal 55 – 56.
- Moore, Kenneth D. (2005). *Effective Instructional Strategies From Theory to Practice*. London: Sage Publications
- Mujiono. 1992. *Metode Pembelajaran*. Jakarta: Depdikbud.
- Omar,H. 1993. *Metodik Belajar dan Kesulitan Belajar*. Bandung: Genesa.
- Raka, Joni. *Strategi Belajar Mengajar*, P3G, Jakarta : 1980
- Ruminiati. (2007). *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sanjaya Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan. Kencana*. Jakarta : 2008.
- Suryanef. 2001. *Penerapan SMU Model-Model VCT di Kota Padang*: UNP, Padang.
- Suryadi dan Somardi. (1999) *Konsep Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan*:

Sebuah Refleksi. Nasionalisme dan upaya

Demokrasi. Vol I. No. 1412-5463

- Stein, Jared., & Graham, C.R. (2014). *Essentials for Blended Learning: A Standar Based Guide*. USA: Routledge.
- Trilling & Hood, 1999. Learning, Technology and Education Reform in The Knowledge Age. Educational Technology , Juni-Mei pp 5-18.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab,A. 1996. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdikbud
- Winataputra, Udin S. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis (Paper)*. Pamulung
- Wing On Lee dan Chi Hang Ho. 2005. *Ideopolitical Shifts and Changes in Moral Education Policy in China,* Journal of Moral Education, Vol. 34, No.4, December, pp. 413-431.
- W. O. Lee.2006. *Tension and Contentions in the Development of Citizenship Curriculum in Asian Countries,* Keynote Address at the CITZED International Conference, Oriel College, Oxford, 25-27 July, 16 pages.
- Zhou, Molly Zhou and David Brown (2015). *Educational Learning Theories*. University System of Gorgia: Galileo



UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

